

2024

LAPORAN KEUANGAN

**PENGADILAN MILITER
UTAMA 663161**

AUDITED





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER UTAMA**

Jalan Raya Penggilingan, RT 10 RW 4, Penggilingan, Kec. Cakung
Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13940, www.dilmiltama.go.id, admin@dilmiltama.go.id

Nomor : 500 /SEK.PMU/KU2.1/V/2025 Jakarta, 7 Mei 2025
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Hal : Penyampaian Laporan Keuangan
Audited Tahun 2024

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Tipe A1 Jakarta VI
Di Jakarta

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jakarta VI Nomor S-808/KPN.1206/2025 Tanggal 30 April 2025 tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan TA 2024 Audited Satuan Kerja Mitra KPPN Jakarta VI, dengan ini kami sampaikan Laporan Keuangan Audited Tahun 2024 Pengadilan Militer Utama satuan kerja 663161.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuasa Pengguna Anggaran
Sekretaris,

Nuratiah

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Militer Utama adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

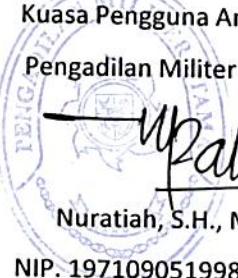
Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Militer Utama mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Militer Utama. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jakarta, 7 Mei 2025

Kuasa Pengguna Anggaran

Pengadilan Militer Utama


Nuratiah, S.H., M.H.
NIP. 197109051998032005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	vi
RINGKASAN	vii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	ix
NERACA	x
LAPORAN OPERASIONAL	xi
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	xii
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
A. PENJELASAN UMUM	1
A.1. Dasar Hukum	1
A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis	2
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	3
A.4. Basis Akuntansi	3
A.5. Dasar Pengukuran	3
A.6. Kebijakan Akuntansi	4
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	11
B.1 Pendapatan	11
B.2 Belanja Pegawai	14
B.3 Belanja Barang	14
B.4 Belanja Modal	15
B.5 Capaian Output	15
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	18
C.1 Persediaan	18

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN MILITER UTAMA AUDITED TAHUN 2024

C.2 Tanah.....	18
C.3 Peralatan dan Mesin	20
C.4 Gedung dan Bangunan	20
C.5 Aset Tetap Lainnya	21
C.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	21
C.7 Utang kepada Pihak Ketiga.....	22
C.8 Ekuitas.....	23
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	24
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	24
D.2 Beban Pegawai.....	24
D.3 Beban Persediaan	25
D.4 Beban Barang dan Jasa	26
D.5. Beban Pemeliharaan	26
D.6 Beban Perjalanan Dinas	27
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	27
D.8 Beban Pendapatan Pelepasan Aset.....	27
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	29
E.1 Ekuitas Awal	29
E.2 Defisit LO	29
E.3 Transaksi Antar Entitas	29
E.4 Ekuitas Akhir.....	29
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA	30
F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca.....	30
F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	30
F.3. Pengungkapan Lain-Lain.....	30

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan</i>	11
<i>Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNBP TA 2024 dan TA 2023</i>	12
<i>Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 31 Desember 2024.....</i>	12
<i>Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023</i>	13
<i>Tabel 5. Perbandingan Belanja Pegawai TA 2024 dan TA 2023</i>	14
<i>Tabel 6. Perbandingan Belanja Barang TA 2024 dan TA 2023</i>	15
<i>Tabel 7. Perbandingan Belanja Modal TA 2024 dan TA 2023</i>	15
<i>Tabel 8. Capaian Output Satuan Kerja</i>	18
<i>Tabel 9. Rincian Persediaan.....</i>	18
<i>Tabel 10. Rincian Saldo Tanah Per 31 Desember 2024</i>	19
<i>Tabel 11. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</i>	21
<i>Tabel 12. Perbandingan Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023</i>	25
<i>Tabel 13. Perbandingan Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023</i>	25
<i>Tabel 14. Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....</i>	26
<i>Tabel 15. Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023</i>	27
<i>Tabel 16. Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....</i>	27
<i>Tabel 17. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 ..</i>	27

Pengadilan Militer Utama

Jl. Raya Penggilingan Cakung, Jakarta Timur

Telp. 021-48701705 Fax. 021-48701705 e-mail : dilmiltama@dilmil.org

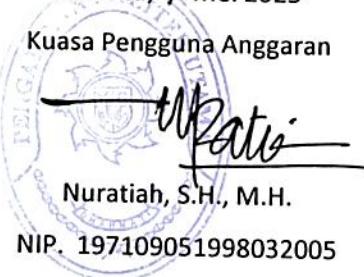
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Militer Utama Audited Tahun 2024 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sampai dengan 31 Desember 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Militer Utama telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 7 Mei 2025

Kuasa Pengguna Anggaran



Nuratiah, S.H., M.H.

NIP. 197109051998032005

RINGKASAN

Laporan Keuangan Pengadilan Militer Utama Audited Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2024. Realisasi Pendapatan Negara periode 31 Desember TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp42.573.720.000,- dari estimasi pendapatan sebesar Rp25.251.000,00 atau mencapai 168,60 persen.

Realisasi Belanja Negara 31 Desember TA 2024 adalah sebesar Rp6.084.402.633,00 atau mencapai 99,34 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp6.124.622.000,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp30.468.650.871,00 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp5.626.730,00 Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp30.463.024.141,00 Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0,-

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp16.862.214,00 dan Rp30.451.788.657,00

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp26.173.720,00. sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp6.461.696.862,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp6.461.696.862,00. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos-PoS Luar Biasa masing-masing sebesar Rp16.400.000,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp6.419.123.142,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp30.829.082.886,00 dikurangi defisit-LO sebesar Rp6.419.123.142,00 dan ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp6.041.828.913,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp30.451.788.657,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN MILITER UTAMA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PER 31 Desember 2024 DAN 31 Desember 2023

URAIAN		TA 2024			TA 2023		
	CATATAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN
PENDAPATAN							
1. Pendapatan	B.1	25.251.000,00	42.573.720,00	168,60	20.885.000,00	20.885.000,00	100,00
Jumlah Pendapatan		25.251.000,00	42.573.720,00	168,60	20.885.000,00	20.885.000,00	100,00
BELANJA							
1. Belanja Pegawai	B.2	3.834.995.000,00	3.799.516.293,00	99,07	3.628.402.000,00	3.448.429.801,00	95,04
2. Belanja Barang	B.3	2.271.645.000,00	2.267.286.340,00	99,81	2.226.290.000,00	2.221.271.459,00	99,77
3. Belanja Modal	B.4	17.982.000,00	17.600.000,00	-	112.000.000,00	110.600.000,00	98,75
Jumlah Belanja		6.124.622.000,00	6.084.402.633,00	99,34	5.966.692.000,00	5.780.301.260,00	96,88

NERACA

**PENGADILAN MILITER UTAMA
NERACA
PER 31 Desember 2024 dan 31 DESEMBER 2023**

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	JUMLAH	
		2024	2023
1	2	3	4
ASET			
Aset Lancar			
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)		-	4.500.000
Persediaan	C. 1	5.626.730	5.723.000
Jumlah Aset Lancar		5.626.730	10.223.000
Aset Tetap			
Tanah	C. 2	25.234.342.000	25.234.342.000
Peralatan dan Mesin	C. 3	6.592.096.332	6.574.496.332
Gedung dan Bangunan	C. 4	5.806.817.600	5.806.817.600
Aset Tetap Lainnya	C. 5	6.940.000	6.940.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C. 6	(7.177.171.791)	(6.789.743.032)
Jumlah Aset Tetap		30.463.024.141	30.832.852.900
Aset Lainnya			
Aset Lain-Lain		-	388.627.800
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya			(388.627.800)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		30.468.650.871	30.843.075.900
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C. 7	16.862.214	13.993.014
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		16.862.214	13.993.014
JUMLAH KEWAJIBAN		16.862.214	13.993.014
EKUITAS			
Ekuitas	C. 8	30.451.788.657	30.829.082.886
JUMLAH EKUITAS		30.451.788.657	30.829.082.886
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		30.468.650.871	30.843.075.900

LAPORAN OPERASIONAL

**PENGADILAN MILITER UTAMA
LAPORAN OPERASIONAL
31 Desember 2024 DAN 31 Desember 2023**

URAIAN 1	CATATAN 2	TA 2024 3	TA 2023 4
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN NEGARA			
PENDAPATAN PERPAJAKAN			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA		26.173.720	20.885.000
PENDAPATAN HIBAH			
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	D. 1	26.173.720	20.885.000
BEBAN			
BEBAN PEGAWAI	D. 2	3.802.989.293	3.447.760.801
BEBAN PERSEDIAAN	D. 3	63.360.037	2.929.796.250
BEBAN BARANG DAN JASA	D. 4	1.297.631.607	1.335.934.513
BEBAN PEMELIHARAAN	D. 5	802.636.425	701.114.905
BEBAN PERJALANAN DINAS	D. 6	107.650.741	116.834.369
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	D. 7	387.428.759	392.528.484
JUMLAH BEBAN		6.461.696.862	8.923.969.322
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(6.435.523.142)	(8.903.084.322)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET			
Pendapatan Pelepasan Aset	D. 8	16.400.000	-
Beban Pelepasan Aset		-	-
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset		16.400.000	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		16.400.000	-
POS LUAR BIASA			
SURPLUS (DEFISIT) LO		(6.419.123.142)	(8.903.084.322)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN MILITER UTAMA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	CATATAN	2024	2023
1	2	3	4
EKUITAS AWAL	E. 1	30.829.082.886,00	30.987.194.898,00
SURPLUS / DEFISIT	E. 2	(6.419.123.142,00)	(8.903.084.322,00)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI		-	-
EKKUITAS			
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN		-	-
KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR			
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		-	-
Koreksi lain-lain		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E. 3	6.041.828.913,00	8.744.972.310,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(377.294.229,00)	(158.112.012,00)
EKUITAS AKHIR	E. 4	30.451.788.657,00	30.829.082.886,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar

Hukum

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan

Akuntansi Pemerintah Pusat;

15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar; dan
16. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

A.2 PROFIL Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Militer Utama

*Profil dan
Kebijakan
Teknis
Pengadilan
Militer Utama*

Rencana Strategis Pengadilan Militer Utama

Rencana Strategis Pengadilan Militer Utama Tahun 2020-2024 merupakan lanjutan dari Renstra Pengadilan Militer Utama Tahun 2015-2019 adalah menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dengan Indikator Sasaran dan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2020-2024.

Visi dan Misi Pengadilan Militer Utama

Dalam rangka mewujudkan harapan di masa depan Pengadilan Militer Utama menetapkan visi sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN MILITER UTAMA YANG AGUNG”.

yang bertujuan agar Pengadilan Militer Utama dan Peradilan Militer dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh Hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Pengadilan Militer Utama adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer Utama sebagai Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan profesional baik Hakim, Panitera maupun Pegawai di lingkungan Pengadilan Militer Utama.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer Utama

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Militer Utama melakukan beberapa sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

<i>Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan</i>	A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan <p>Laporan Keuangan Audited Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Militer Utama. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.</p> <p>SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.</p>
<i>Basis Akrual</i>	A.4. Basis Akuntansi <p>Pengadilan Militer Utama menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.</p> <p>Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.</p> <p>Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.</p>

A.5. Dasar Pengukuran

<i>Dasar Pengukuran</i>	Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan
-------------------------	--

Militer Utama dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6.Kebijakan Akuntansi

*Kebijakan
akuntansi*

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Audited Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pengadilan Militer Utama yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Militer Utama. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Militer Utama adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan – LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan – LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah

ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pengadilan Militer Utama adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan persekol gaji;
 - Pendapatan atas sewa tanah, gedung, dan bangunan;
 - Pendapatan atas Tagihan Tuntutan ganti Rugi (TGR).
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal;
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan	100%

	pelunasan	
2.	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak termasuk dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Penggerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan. Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

- Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan.	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kebijakan

Akuntansi

atas

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pengadilan Militer Utama telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 8 (delapan) kali dari DIPA awal. Pagu anggaran terlihat sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	
	Anggaran Awal	Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Lain-lain	25.251.000	25.251.000
Jumlah Pendapatan	25.251.000	25.251.000
Belanja		
Belanja Pegawai	4.104.995.000	3.834.995.000
Belanja Barang	2.171.645.000	2.271.645.000
Belanja Modal	-	17.982.000
Jumlah Belanja	6.276.640.000	6.124.622.000

*Realisasi**Pendapatan*

Rp42.573.720,00

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp42.573.720,00.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Pengadilan Militer Utama adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	2024		
		Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	25.251.000,00	26.173.720,00	103,65
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	16.400.000,00	-
Jumlah Pendapatan Bruto		25.251.000,00	42.573.720,00	168,60
Pengembalian		-	-	0,00
Jumlah Pendapatan Netto		25.251.000,00	42.573.720,00	168,60

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN MILITER UTAMA AUDITED TAHUN 2024

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak periode 31 Desember 2024 sebesar Rp42.573.720,00 merupakan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan berupa Sewa ATM BRI Rp25.251.000,00, denda keterlambatan bayar tahun 2023 Rp417.700,00 dan denda keterlambatan bayar tahun 2024 Rp505.020,00 serta penjualan kendaran dinas roda 4 Toyota Camry Rp16.400.000,00 .

Perbandingan realisasi PNBP TA 2024 dan TA 2023 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNBP TA 2024 dan TA 2023

KODE	Uraian	TA 2024	TA 2023	(dalam rupiah)	
				Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	26.173.720,00	20.885.000,00	5.288.720,00	-
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	16.400.000,00	-	16.400.000,00	-
Jumlah Pendapatan Netto		42.573.720,00	20.885.000,00	5.288.720,00	25,32

Realisasi

Belanja

Belanja

Negara

*Rp6.084.402.633,00
00*

Realisasi Belanja Pengadilan Militer Utama pada periode 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.084.402.633,00 atau 99,34 persen dari anggaran belanja sebesar Rp6.124.622.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja periode 31 Desember 2024 tersaji sebagai berikut:

Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 31 Desember 2024

(dalam rupiah)				
Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
51	Belanja Pegawai	3.834.995.000,00	3.817.716.673,00	99,55
52	Belanja Barang	2.271.645.000,00	2.267.286.340,00	99,81
53	Belanja Modal	17.982.000,00	17.600.000,00	0,00
Jumlah Belanja Bruto		6.124.622.000,00	6.102.603.013,00	99,64
Pengembalian Belanja		-	18.200.380,00	0,00
Jumlah Belanja Netto		6.124.622.000,00	6.084.402.633,00	99,34

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini :



Realisasi belanja periode 31 Desember 2024 mengalami peningkatan dibandingkan realisasi periode 31 Desember 2023. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya peningkatan belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada Pengadilan Militer Utama pada tahun 2024.

Perbandingan realisasi belanja periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/ (Penurunan)	
		TA 2024	TA 2023	(Rp)	%
51	Belanja Pegawai	3.799.516.293,00	3.448.429.801,00	351.086.492,00	10,18
52	Belanja Barang	2.267.286.340,00	2.221.271.459,00	46.014.881,00	2,07
53	Belanja Modal	17.600.000,00	110.600.000,00	(93.000.000,00)	-
Jumlah Belanja Netto		6.084.402.633,00	5.780.301.260,00	304.101.373,00	5,26

B.2 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Rp3.799.516.293,00

Realisasi Belanja Pegawai periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.799.516.293,00 dan Rp3.448.429.801,00. Realisasi Belanja Pegawai mengalami peningkatan sebesar Rp351.086.492,00 atau 10,18 persen dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai periode sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan terdapat peningkatan jumlah pegawai tahun 2024 pada Pengadilan Militer Utama.

Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Perbandingan Belanja Pegawai TA 2024 dan TA 2023

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		(dalam rupiah)	
	TA 2024	TA 2023	(Rp)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	837.444.220,00	718.223.260,00	119.220.960,00	16,60
Belanja Pembulatan Gaji PNS	15.525,00	12.457,00	3.068,00	24,63
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	56.604.104,00	44.225.946,00	12.378.158,00	27,99
Belanja Tunj. Anak PNS	15.167.034,00	12.876.304,00	2.290.730,00	17,79
Belanja Tunj. Struktural PNS	107.240.000,00	107.240.000,00	-	-
Belanja Tunj. Fungsional PNS	6.720.000,00	1.920.000,00	4.800.000,00	1,00
Belanja Tunj. PPh PNS	8.447.825,00	3.320.869,00	5.126.956,00	154,39
Belanja Tunj. Beras PNS	46.566.060,00	40.482.780,00	6.083.280,00	15,03
Belanja Uang Makan PNS	140.639.000,00	129.883.000,00	10.756.000,00	8,28
Belanja Tunjangan Umum PNS	32.500.000,00	28.195.000,00	4.305.000,00	15,27
Belanja Tunjangan Fungsional TNI/POLRI	2.085.580.000,00	2.016.520.000,00	69.060.000,00	3,42
Belanja Tunjangan PPh TNI/POLRI	293.646.181,00	334.491.895,00	(40.845.714,00)	(12,21)
Belanja Gaji Pokok PPPK	134.551.200,00	8.899.500,00	125.651.700,00	-
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.964,00	141,00	1.823,00	-
Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	4.485.040,00	296.650,00	4.188.390,00	-
Belanja Tunj. Fungsional PPPK	21.742.000,00	1.553.000,00	20.189.000,00	-
Belanja Tunj. Beras PPPK	4.055.520,00	289.680,00	3.765.840,00	-
Belanja Uang Makan PPPK	22.311.000,00	-	22.311.000,00	-
Realisasi Belanja Bruto	3.817.716.673,00	3.448.430.482,00	193.178.438,00	5,60
Pengembalian	18.200.380,00	681,00	18.199.699,00	-
Realisasi Belanja Netto	3.799.516.293,00	3.448.429.801,00	351.086.492,00	10,18

B.3 Belanja Barang

Belanja Barang Rp2.267.286.340,00

Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.267.286.340,00 dan Rp2.221.271.459,00. Realisasi Belanja Barang mengalami peningkatan sebesar Rp46.014.881,00 atau 2,07 persen dibandingkan

dengan realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2023. Kenaikan ini dikarenakan adanya peningkatan belanja pemeliharaan.

Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Perbandingan Belanja Barang TA 2024 dan TA 2023

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2024	TA 2023	(Rp)	%
Belanja Barang Operasional	1.110.467.588,00	1.132.995.499,00	(22.527.911,00)	(1,99)
Belanja Barang Non Operasional	-	10.095.000,00	(10.095.000,00)	-
Belanja Barang Persediaan	63.263.767,00	63.208.000,00	55.767,00	0,09
Belanja Jasa	183.267.819,00	197.023.686,00	(13.755.867,00)	(6,98)
Belanja Pemeliharaan	802.636.425,00	701.114.905,00	101.521.520,00	14,48
Belanja Perjalanan Dinas	107.650.741,00	116.834.369,00	(9.183.628,00)	(7,86)
Realisasi Belanja Bruto	2.267.286.340,00	2.221.271.459,00	46.014.881,00	2,07
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	2.267.286.340,00	2.221.271.459,00	46.014.881,00	2,07

B.4 Belanja Modal

Belanja

Modal

Rp17.600.000,00

Realisasi Belanja Modal periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp17.600.000,00 dan Rp110.600.000,00.

Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. Perbandingan Belanja Modal TA 2024 dan TA 2023

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2024	TA 2023	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.600.000,00	110.600.000,00	(93.000.000,00)	100,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Belanja Modal Jaringan	-	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-	-
Realisasi Belanja Bruto	17.600.000,00	110.600.000,00	(93.000.000,00)	100,00
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	17.600.000,00	110.600.000,00	(93.000.000,00)	100,00

B.5. Capaian Output Satuan Kerja

Selama periode Desember Tahun 2024, output satuan kerja yang telah dicapai oleh Pengadilan Militer Utama sebagai berikut:

Tabel 8. Capaian Output Satuan Kerja

Kode	Kegiatan	BELANJA			KELUARAN				Keterangan
		Pagu	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	%	
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	6.106.640.000	6.066.803.013	99,35%	1.0	Layanan	1.0	100%	Pembayaran Gaji dan Operasional Perkantoran Bulan Desember 2024
6986									
994	Layanan Perkantoran								
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	17.982.000	17.600.000	97,88%	4.0	Unit	4.0	100%	Realisasi Belanja Modal sebanyak 4 unit
951	Layanan Sarana Internal								

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Persediaan

Persediaan
Rp5.626.730,00

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp5.626.730,00 dan Rp5.723.000,00,

Persediaan merupakan jenis Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Rincian Persediaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	Mutasi	31 Desember 2024
1	Barang Konsumsi	5.723.000,00	(96.270,00)	5.626.730,00
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-	-
3	Persediaan lainnya	-	-	-
Jumlah		5.723.000,00	(96.270,00)	5.626.730,00

C.2 Tanah

Tanah
Rp25.234.342.000,
00

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Pengadilan Militer Utama per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp25.234.342.000,00 dan Rp25.234.342.000,00.

Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	25.234.342.000,00
Mutasi tambah:	0,00
Mutasi kurang:	0,00
Jumlah Mutasi	0,00
Saldo per 31 Desember 2024	25.234.342.000,00

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN MILITER UTAMA AUDITED TAHUN 2024

Tabel 10. Rincian Saldo Tanah Per 31 Desember 2024

JENIS BMN	NUP	TANAH MILIK SENDIRI			LUAS (m2)	NILAI PEROLEHAN
		NO DAN TANGGAL SERTIFIKAT	ALAMAT LOKASI TANAH	KEPEMILIKAN ATAS NAMA		
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	090441003400346 Tanggal 02-08-2007	Jl. Raya Penggilingan Cakung Jakarta Timur	Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI	3.000	25.234.342.000,00
Jumlah Halaman I					3.000	25.234.342.000,00

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN MILITER UTAMA AUDITED TAHUN 2024

C.3 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin
Rp6.592.096.332,00
332,00

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp6.592.096.332,00 dan Rp6.574.496.332,00 .
 Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	6.574.496.332
Pembelian	-
Transfer Masuk	-
Jumlah Mutasi Tambah	-
Tansfer Keluar	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 31 Desember 2024	6.592.096.332
Akumulasi Penyusutan	(6.167.568.956)
Nilai Buku	424.527.376

C.4 Gedung dan Bangunan Pengadilan Militer Utama

Gedung dan Bangunan
Rp5.806.817.600,00

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp5.806.817.600,00 dan Rp5.806.817.600,00 .
 Mutasi nilai gedung dan bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	5.806.817.600,00
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 31 Desember 2024	5.806.817.600,00
Akumulasi Penyusutan	(1.009.602.835,00)
Nilai Buku	4.797.214.765,00

C.5 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya
Rp6.940.000,
00*

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp6.940.000,00 dan Rp6.940.000,00. Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	6.940.000,00
Pembelian	-
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 31 Desember 2024	6.940.000,00
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	6.940.000,00

C.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp7.177.171.7
91,00*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp7.177.171.791,00 dan Rp6.789.743.032,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasiannya atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2024 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 11. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	6.592.096.332	(6.167.568.956)	424.527.376
2	Gedung dan Bangunan	5.806.817.600	(1.009.602.835)	4.797.214.765
3	Aset Tetap Lainnya	6.940.000	-	6.940.000
Jumlah		12.405.853.932	(7.177.171.791)	5.228.682.141

*Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp16.862.214,
00*

C.7 Utang kepada Pihak Ketiga

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp16.862.214,00 dan Rp13.993.014,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga:

No	Akun	Uraian	Jumlah	Penjelasan
A	Belanja Pegawai		14.805.000	
1	511129	Belanja Uang Makan PNS	12.981.000	Uang Makan PNS Desember 2024
2	511628	Belanja Uang Makan PPPK	1.887.000	Uang Makan PPPK Desember 2024
B	Belanja Barang		2.057.214	
	522112	Belanja Langganan Telepon	144.572	Pembayaran Telepon Tagihan Januari 2025 atas Pemakaian Desember 2024 GUP
	522113	Belanja Langganan Air	1.840.270	Pembayaran Air GUP Tagihan Januari 2025 atas Pemakaian Desember 2024
	522112	Belanja Langganan Telepon	72.372	Pembayaran Telepon Tagihan Januari 2025 atas Pemakaian Desember 2024 LS
		Jumlah	16.862.214	

0

C.8 Ekuitas

Ekuitas
Rp30.451.788.657,00
Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp30.451.788.657,00 dan Rp30.829.082.886,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBP Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp26.173.720,00 dan Rp20.885.000,00. Pendapatan berupa Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan untuk ATM BRI.

Rp26.173.720,00

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.802.989.293,00 dan Rp3.447.760.801,00 . Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rp3.802.989.293,00

Perbandingan Rincian Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 12. Perbandingan Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun) %
1	Beban Gaji Pokok PNS	837.444.220,00	718.223.260,00	16,60
2	Beban Pembulatan Gaji PNS	15.145,00	11.776,00	28,61
3	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	56.604.104,00	44.225.946,00	27,99
4	Beban Tunj. Anak PNS	15.167.034,00	12.876.304,00	17,79
5	Beban Tunj. Struktural PNS	107.240.000,00	107.240.000,00	-
6	Beban Tunj. Fungsional PNS	6.720.000,00	1.920.000,00	-
7	Beban Tunj. PPh PNS	8.447.825,00	3.320.869,00	102,36
8	Beban Tunj. Beras PNS	46.566.060,00	40.482.780,00	(79,13)
9	Beban Uang Makan PNS	144.075.000,00	127.364.000,00	(63,44)
10	Beban Tunjangan Umum PNS	32.500.000,0	28.195.000,00	410,99
11	Beban Tunjangan Fungsional TNI	2.067.380.000,00	2.016.520.000,0	(98,39)
12	Beban Tunjangan PPh TNI	293.646.181,00	334.491.895,00	518,07
13	Beban Gaji Pokok PPPK	134.551.200,00	8.899.500,00	-
14	Beban Pembulatan Gaji PPPK	1.964,00	141,00	-
15	Beban Tunj. Suami/Istri PPPK	4.485.040,00	296.650,00	-
16	Beban Tunj. Fungsional PPPK	21.742.000,00	1.553.000,00	-
17	Beban Tunj. Beras PPPK	4.055.520,00	289.680,00	-
18	Beban Uang Makan PNS	22.348.000,00	1.850.000,00	-
19	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0,00	0,00	-
Total		3.802.989.293,00	3.447.760.801,00	10,30

Beban Pegawai tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp355.228.492,00 atau sebesar 10,30 persen jika dibandingkan dengan tahun 2023, karena ada peningkatan jumlah pegawai tahun 2024 pada Pengadilan Militer Utama.

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp63.360.037,00

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp63.360.037,00 dan Rp2.929.796.250,00 . Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Tabel 13. Perbandingan Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun) %
1	Beban Persediaan Konsumsi	63.360.037,00	2.929.796.250,00	(97,84)
	Total	63.360.037,00	2.929.796.250,00	(97,84)

D.4 Beban Barang dan Jasa*Beban Barang dan**Jasa**Rp1.297.631.607,00*

Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.297.631.607,00 dan Rp1.335.934.513,00 . Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 14. Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun) %
1	Beban Keperluan Perkantoran	1.050.182.108,00	1.035.560.140,00	1,41
2	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	15.433.980,00	11.494.000,00	34,28
3	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	43.488.000,00	83.604.000,00	(47,98)
4	Beban Barang Operasional Lainnya	1.143.500,00	2.557.359,00	(55,29)
5	Beban Peralatan dan Mesin-Ekstrakomptabel	0,00	10.095.000,00	-
6	Beban Langganan Telepon	2.553.369,00	2.942.374,00	(13,22)
7	Beban Langganan Air	19.472.240,00	20.041.640,00	(2,84)
8	Beban Sewa	164.158.410,00	167.340.000,00	(1,90)
9	Beban Jasa Lainnya	1.200.000,00	2.300.000,00	(47,83)
Total		1.297.631.607,00	1.335.934.513,00	(2,87)

D.5. Beban Pemeliharaan*Beban**Pemeliharaan**Rp802.636.425,00*

Beban pemeliharaan pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp802.636.425,00 dan Rp701.114.905,00 . Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun) %
1	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	391.385.300,00	300.128.100,00	30,41
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	411.251.125,00	400.986.805,00	2,56
	Total	802.636.425,00	701.114.905,00	14,48

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Rp107.650.741,00 Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp107.650.741,00 dan Rp116.834.369,00 . Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun) %
1	Beban Perjalanan Biasa	78.707.547,00	86.057.149,00	(8,54)
2	Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	16.950.000,00	14.850.000,00	14,14
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	9.402.000,00	-
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	11.993.194,00	6.525.220,00	83,80
	Total	107.650.741,00	116.834.369,00	(7,86)

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp387.428.759,00 Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp387.428.759,00 dan Rp392.528.484,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun) %
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	252.295.949,00	257.395.674,00	(1,98)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	135.132.810,00	135.132.810,00	-
	Jumlah Penyusutan	387.428.759,00	392.528.484,00	(1,30)

D.8 Pendapatan Pelepasan Aset

Pendapatan
Pelepasan Aset
Rp16.400.000,00

Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp16.400.000,00 dan Rp0,00. Pendapatan Pelepasan Aset berupa Pendapatan dari Penjualan Kendaraan dinas roda 4 Toyota Camry sebesar Rp16.400.000,00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**E.1 Ekuitas Awal**

Ekuitas Awal
Rp30.829.082.886,00

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp30.829.082.886,00 dan Rp30.987.194.898,00.

E.2 Defisit LO

Defisit LO
Rp6.419.123.142,00

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah defisit sebesar Rp6.419.123.142,00 dan Rp8.903.084.322,00. Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

E.3 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas
Rp6.041.828.913,00

Nilai transaksi antar ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp6.041.828.913,00 dan Rp8.744.972.310,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	6.084.402.633,00
Diterima dari Entitas Lain	(42.573.720,00)
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
	6.041.828.913,00

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar Rp42.573.720,00 sedangkan DKEL sebesar Rp6.084.402.633 ,00.

E.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp30.451.788.657,00

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp30.451.788.657,00 dan Rp30.829.082.886,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal necara per 31 Desember 2024 pada Pengadilan Militer Utama yang mempengaruhi penyajian posisi Laporan Keuangan per 31 Desember 2024.

F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Tidak terdapat temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI per 31 Desember 2024 pada Pengadilan Militer Utama.

F.3. Pengungkapan Lain-Lain

Laporan Keuangan Pengadilan Militer Utama untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 menyajikan pengungkapan-pengungkapan yang meliputi:

1. Rekening pada Satuan Kerja Pengadilan Militer Utama

Rekening Pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Militer Utama adalah BANK RAKYAT INDONESIA CABANG JAKARTA JATINEGARA A/C 653246631611000 a.n. BPG 17 PM UTAMA (663161) yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00

2. Berdasarkan Keputusan Kadilmiltama Nomor 96/KPMU/SK.KU1.1.1/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Penetapan Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Pengadilan Militer Utama dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 99/SEK.PMU/SK.KU1.1.1/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Pengadilan Militer Utama dengan susunan sebagai berikut :

- a. Kuasa Pengguna Anggaran : Nuratiah, S.H., M.H.
- b. PPK : Try Susanti, S.E.
- c. PPSPM : Dwi Mulyanto, S.E., M.M.
- d. Bendahara Pengeluaran : Noviani Nistria Susanti

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL**
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 663161 PENGADILAN MILITER UTAMA

Tgl Data : 31/01/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 31/01/24 10:27 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

KODE	URAIAN	SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023						NILAI BUKU	
			KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN					
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL		
2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9		
1			3,000	25,234,342,000	0	0	0	0	25,234,342,000	
131111	Tanah	M2	3,000	25,234,342,000	0	0	0	0	25,234,342,000	
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		913	6,574,496,332	(5,638,648,583)	(276,624,424)	0	(5,915,273,007)	659,223,325	
132111	Peralatan dan Mesin	Unit	4	981,321,612	(981,321,612)	0	0	(981,321,612)	0	
3020101001	Sedan	Unit	1	311,600,000	(311,600,000)	0	0	(311,600,000)	0	
3020101003	Station Wagon	Unit	2	319,249,000	(319,249,000)	0	0	(319,249,000)	0	
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	6	103,697,000	(103,697,000)	0	0	(103,697,000)	0	
3020104001	Sepeda Motor	Unit	1	5,500,000	(5,500,000)	0	0	(5,500,000)	0	
3020201002	Gerobak Dorong	Unit	1	1,200,000	(300,000)	(600,000)	0	(900,000)	300,000	
3020202003	Kursi Roda	Buah	5	45,963,764	(45,963,764)	0	0	(4,119,500)	0	
3040104004	Lemari Penyimpanan	Buah	2	4,119,500	(4,119,500)	0	0	(148,900,000)	0	
3050101004	Mesin Ketik Listrik	Buah	2	146,800,000	(148,900,000)	0	0	(76,940,000)	3,600,000	
3050103007	Mesin Fotocopy Folio	Buah	30	80,540,000	(74,142,000)	(2,798,000)	0	(143,796,332)	0	
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	12	143,796,332	(143,796,332)	0	0	(11,940,800)	0	
3050104002	Lemari Kayu	Buah	2	11,940,800	(11,940,800)	0	0	(16,657,520)	0	
3050104003	Rak Besi	Buah	5	16,657,520	(16,657,520)	0	0	(37,325,500)	0	
3050104004	Rak Kayu	Buah	20	37,325,500	(37,325,500)	0	0	(27,573,480)	0	
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	18	27,573,480	(27,573,480)	0	0	(24,107,169)	0	
3050104006	Filing Cabinet Kayu	Buah	2	24,107,169	(24,107,169)	0	0	(60,442,000)	0	
3050104007	Brandkas	Buah	2	60,442,000	(60,442,000)	0	0	(5,940,000)	0	
3050104014	Mobile File	Buah	1	5,940,000	(5,940,000)	0	0	(549,284)	1,281,661	
3050104020	Lemari Display	unit	1	1,830,945	(183,095)	(366,189)	0	(12,105,000)	0	
3050104029	Box Camera	Buah	5	12,105,000	(12,105,000)	0	0	(44,210,717)	30,883,339	
3050105001	Tabung Pemadam Api	Buah	32	75,094,056	(35,386,907)	(8,823,810)	0	(2,345,000)	1,800,000	
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	2	4,145,000	(1,930,500)	(414,500)	0	(5,169,000)	0	
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	1	5,169,000	(5,169,000)	0	0	(7,070,000)	6,210,000	
3050105024	Alat Pemotong Kertas	Buah	2	13,280,000	(6,380,000)	(690,000)	0	(5,989,000)	0	
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	2	5,989,000	(5,989,000)	(970,000)	0	(1,455,000)	3,395,000	
3050105081	Papan Pengumuman	dummy	2	4,850,000	(485,000)	(970,000)	0	(562,547,446)	0	
3050199999	Alat Kantor Lainnya	Buah	70	562,547,446	(562,547,446)	0	0	(131,938,300)	0	
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	176	131,938,300	(131,938,300)	0	0	(35,940,300)	0	
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	11	35,940,300	(35,940,300)	0	0	(77,277,000)	0	
3050201004	Kursi Kayu	Buah	31	77,277,000	(77,277,000)	0	0	(12,533,400)	0	
3050201005	Slice	Buah	6	12,533,400	(12,533,400)	0	0	(50,974,143)	0	
3050201007	Bangku Panjang Kayu	Buah	4	50,974,143	(50,974,143)	0	0	(42,323,600)	0	
3050201008	Meja Rapat	Buah	28	42,323,600	(42,323,600)	0	0	(18,838,500)	22,626,500	
3050201009	Meja Komputer	Buah	19	41,465,000	(7,465,500)	(11,373,000)	0			
3050201010	Tempat Tidur Besi	Buah								

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL**
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 663161 PENGADILAN MILITER UTAMA

Tgl Data : 31/01/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 31/01/24 10:27 AM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

KODE	URAIAN	SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023						NILAI BUKU	
			KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN					
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL		
2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9		
1										
3050201011	Tempat Tidur Kayu	Buah	2	6,963,000	(6,963,000)	0	0	(6,963,000)	0	
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	2	24,155,842	(24,155,842)	0	0	(24,155,842)	0	
3050201019	Meja Makan Kayu	Buah	1	5,170,000	(5,170,000)	0	0	(5,170,000)	0	
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	41	41,245,600	(41,245,600)	0	0	(41,245,600)	0	
3050201025	Gantungan Jas	Buah	2	974,600	(974,600)	0	0	(974,600)	0	
3050201033	Sofa	set	2	9,400,000	(940,000)	(1,880,000)	0	(2,820,000)	6,580,000	
3050201999	Meubelair Lainnya	dummy	30	347,228,827	(347,228,827)	0	0	(347,228,827)	0	
3050203999	Alat Pembersih Lainnya	dummy	4	5,885,000	(5,571,500)	(313,500)	0	(5,885,000)	0	
3050204001	Lemari Es	Buah	6	30,954,180	(30,954,180)	0	0	(30,954,180)	0	
3050204004	A.C. Split	Buah	54	290,127,200	(197,427,200)	(9,270,000)	0	(206,697,200)	83,430,000	
3050206002	Televisi	Buah	11	83,231,000	(69,301,000)	(3,980,000)	0	(73,281,000)	9,950,000	
3050206004	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	Buah	1	10,947,500	(10,947,500)	0	0	(10,947,500)	0	
3050206007	Loudspeaker	Buah	8	18,400,000	(12,170,000)	(1,780,000)	0	(13,950,000)	4,450,000	
3050206008	Sound System	Buah	3	44,030,800	(40,075,800)	(1,130,000)	0	(41,205,800)	2,825,000	
3050206013	Megaphone	Buah	1	4,000,000	(4,000,000)	0	0	(4,000,000)	6,875,000	
3050206014	Microphone	Buah	11	13,750,000	(4,125,000)	(2,750,000)	0	(416,250)	971,250	
3050206017	Unit Power Supply	Buah	1	1,387,500	(138,750)	(277,500)	0	(6,996,666)	0	
3050206020	Camera Video	Buah	1	6,995,666	(6,996,666)	0	0	(1,983,300)	0	
3050206026	Lambang Garuda Pancasila	Buah	3	1,983,300	(1,983,300)	0	0	(1,293,600)	0	
3050206027	Gambar Presiden/Wakil Presiden	Buah	3	1,293,600	(1,293,600)	0	0	(18,623,000)	0	
3050206030	Tiang Bendera	Buah	8	18,623,000	(18,623,000)	0	0	(4,475,828)	0	
3050206033	Water Filter	Buah	1	4,475,828	(4,475,828)	0	0	(5,317,000)	0	
3050206034	Tangga Aluminium	Buah	1	5,317,000	(5,317,000)	0	0	(38,322,500)	0	
3050206036	Dispenser	Buah	18	38,322,500	(38,322,500)	0	0	(3,300,000)	0	
3050206037	Mimbar/Podium	Buah	1	3,300,000	(3,300,000)	0	0	(4,475,828)	0	
3050206042	Lambang Instansi	Buah	1	4,475,828	(4,475,828)	0	0	(12,375,000)	0	
3050206078	Bingkai Foto	Buah	1	12,375,000	(12,375,000)	0	0	(1,980,000)	0	
3060101002	Audio Mixing Portable	Buah	2	1,980,000	(1,980,000)	0	0	(12,000,000)	0	
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	12	12,000,000	(12,000,000)	0	0	(50,060,700)	5,064,300	
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	7	55,125,000	(42,895,700)	(7,065,000)	0	(41,200,500)	0	
3060101060	Power Amplifier	Buah	1	41,200,500	(41,200,500)	0	0	(1,515,616)	0	
3060102042	Rak Peralatan	Buah	3	1,515,616	(1,515,616)	0	0	(29,978,500)	0	
3060102057	Slide Projector	Buah	1	29,978,500	(29,978,500)	0	0	(36,283,000)	6,345,500	
3060102128	Camera Digital	Buah	2	42,628,500	(34,470,000)	(1,813,000)	0	(10,986,002)	6,455,250	
3060102135	LCD Monitor	Buah	5	17,441,252	(8,404,502)	(2,581,500)	0	(1,815,000)	0	
3060102151	Splitter	Buah	1	1,815,000	(1,815,000)	0	0	(25,750,000)	25,750,000	
3060102165	Camera Conference	Buah	1	51,500,000	(15,450,000)	(10,300,000)	0			

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL**
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 663161 PENGADILAN MILITER UTAMA

Tgl Data : 31/01/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 31/01/24 10:27 AM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

KODE	URAIAN	SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023						NILAI BUKU	
			KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			TOTAL		
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI			
2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9		
1										
3060105010	Contact Printer	Buah	3	89,885,322	(89,885,322)	0	0	(89,885,322)	0	
3060201001	Telephone (PABX)	Buah	1	21,230,000	(21,230,000)	0	0	(21,230,000)	0	
3060201010	Facsimile	Buah	8	25,449,000	(25,449,000)	0	0	(25,449,000)	0	
3060207005	Finger Printer Time and Attendance Acces Control System	Buah	2	13,950,000	(13,950,000)	0	0	(13,950,000)	10,256,400	
3060209007	Digital Recording System	Buah	1	14,652,000	(1,465,200)	(2,930,400)	0	(12,720,000)	0	
3060323015	Switcher/Patch Panel	Buah	2	12,720,000	(12,159,000)	(561,000)	0	(174,009,000)	142,371,000	
3060347002	Genset	Buah	1	316,380,000	(142,371,000)	(31,638,000)	0	(469,724,504)	106,362,500	
3100102001	P.C Unit	Buah	44	576,087,004	(391,204,229)	(78,520,275)	0	(377,303,916)	89,018,750	
3100102002	Lap Top	Buah	33	466,322,666	(330,762,666)	(46,541,250)	0	(36,500,000)	0	
3100201006	CPU (Peralatan Mainframe)	Buah	5	36,500,000	(36,500,000)	0	0	(108,435,930)	12,387,500	
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	45	120,823,430	(102,260,930)	(6,175,000)	0	(32,321,654)	12,406,250	
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	5	44,727,904	(24,877,904)	(7,443,750)	0	(71,692,500)	52,937,500	
3100204001	Server	Buah	2	124,630,000	(39,930,000)	(31,762,500)	0	(6,100,000)	0	
3100204002	Router	Buah	1	6,100,000	(6,100,000)	0	0	(2,814,375)	4,690,625	
3100204014	Rak Server	Buah	1	7,505,000	(938,125)	(1,876,250)	0	(874,470,025)	4,932,347,575	
133111	Gedung dan Bangunan	Unit	1	5,806,817,600	(739,337,215)	(135,132,810)	0	(874,470,025)	4,932,347,575	
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	3	6,940,000	0	0	0	0	6,940,000	
135121	Aset Tetap Lainnya	Buah	3	6,940,000	0	0	0	0	0	
6010101001	Monografi		1	388,627,800	(388,627,800)	0	0	(388,627,800)	0	
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	Unit	1	388,627,800	(388,627,800)	0	0	(388,627,800)	0	
3020101001	Sedan		3,918	38,011,223,732	(6,766,613,598)	(411,757,234)	0	(7,178,370,832)	30,832,852,900	
JUMLAH										

Jakarta, 31 Januari 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang
Nuratiah, S.H., M.H.
197109051998032005



**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL**
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 663161 PENGADILAN MILITER UTAMA

Tgl Data : 31/01/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 31/01/24 10:27 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_salker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI PENYUSUTAN	BEBAN PENYUSUTAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	TOTAL AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=5-9
132111	Peralatan dan Mesin		131	34,445,452	(18,612,142)	(2,722,180)	0	(21,334,322)	13,111,130
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	3	2,640,000	0	(333,000)	0	(333,000)	2,307,000
3050104003	Rak Besi	Buah	2	999,900	(99,900)	(199,980)	0	(299,970)	699,930
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	1	950,000	(95,000)	(190,000)	0	(285,000)	665,000
3050105056	Panic Button System, Alarm Indicator	Buah	1	500,000	(50,000)	(100,000)	0	(150,000)	350,000
3050199999	Alat Kantor Lainnya	dummy	11	3,926,000	(392,600)	(785,200)	0	(1,177,800)	2,748,200
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	2	1,730,000	0	(346,000)	0	(346,000)	1,384,000
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	18	5,725,000	0	(768,000)	0	(768,000)	4,957,000
3050201009	Meja Komputer	Buah	10	1,425,000	(1,425,000)	0	0	(1,425,000)	0
3050202003	Jam Elektronik	Buah	25	4,125,000	(4,125,000)	0	0	(4,125,000)	0
3050206057	Vertikal Blind	Buah	54	11,394,676	(11,394,676)	0	0	(11,394,676)	0
3050206080	Bracket Standing Peralatan	Buah	2	470,800	(470,800)	0	0	(470,800)	0
3060102061	Lensa Kamera	Buah	2	559,076	(559,076)	0	0	(559,076)	0
JUMLAH			131	34,445,452	(18,612,142)	(2,722,180)	0	(21,334,322)	13,111,130

Jakarta, 31 Januari 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang


 Nurulrah, S.H., M.H.
 197109051998032005

DAFTAR REKAPITULASI HIBAH
PENGADILAN MILITER UTAMA
S.D 31 DESEMBER 2024

NO	NOMOR REGISTER	KODE SATKER	WILAYAH	SATKER	TANGGAL PENGESAHAN HIBAH	NILAI PEROLEHAN	STATUS HIBAH	NOMOR PERSETUJUAN MPHL
1	-	663161	DKI JAKARTA	PENGADILAN MILITER UTAMA	-	-	-	

Jakarta, 25 Februari 2025

Sekretaris

Nuratiah, S.H., MH
NIP. 197109051998032005



**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
KONTRUKSI DALAM PENGERAJAAN
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

**UAPB : 005
UAKPB : 663161**

**MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN MILITER UTAMA**

Tgl Data : 10/02/25 12:28 PM
Tanggal : 10/02/25 5:47 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_kdp_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		JUMLAH S.D 1 JANUARI 2024	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO PER 31 DESEMBER 2024	KETERANGAN
KODE	URAIAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN MILITER UTAMA 663161

Tgl Data : 05/05/25 8:49 AM
Tgl Cetak : 05/05/25 3:24 PM
Halaman : 1
lap lra face satker new poc

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
 ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
 SATUAN KERJA : PENGADILAN MILITER UTAMA 663161

Tgl Data : 05/05/25 8:49 AM
 Tgl Cetak : 05/05/25 3:24 PM
 Halaman : 2
 lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	6,124,622,000	6,084,402,633	(40,219,367)	99.34	5,966,692,000	5,780,301,260	(186,390,740)	96.88
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 5 Mei 2025
 Penanggung Jawab UAKPA
 Sekretaris Pengadilan Militer Utama


 Nuratiah, S.H., M.H.
 Pembina Utama Muda

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
 SATUAN KERJA : (663161) PENGADILAN MILITER UTAMA

Tgl Data : 05/05/25 8:49 AM
 Tgl Cetak : 05/05/25 3:24 PM
 Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASSET LANCAR				
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	4,500,000	(4,500,000)	(100.00)
Persediaan	5,626,730	5,723,000	(96,270)	(1.68)
JUMLAH ASSET LANCAR	5,626,730	10,223,000	(4,596,270)	(44.96)
ASSET TETAP				
Tanah	25,234,342,000	25,234,342,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	6,592,096,332	6,574,496,332	17,600,000	0.27
Gedung dan Bangunan	5,806,817,600	5,806,817,600	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	6,940,000	6,940,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(7,177,171,791)	(6,789,743,032)	(387,428,759)	5.71
JUMLAH ASSET TETAP	30,463,024,141	30,832,852,900	(369,828,759)	(1.20)
ASSET LAINNYA				
Aset Lain-lain	0	388,627,800	(388,627,800)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	0	(388,627,800)	388,627,800	(100.00)
JUMLAH ASSET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	30,468,650,871	30,843,075,900	(374,425,029)	(1.21)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	16,862,214	13,993,014	2,869,200	20.50
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	16,862,214	13,993,014	2,869,200	20.50
JUMLAH KEWAJIBAN	16,862,214	13,993,014	2,869,200	20.50
EKUITAS				
Ekuitas	30,451,788,657	30,829,082,886	(377,294,229)	(1.22)
JUMLAH EKUITAS	30,451,788,657	30,829,082,886	(377,294,229)	(1.22)
JUMLAH EKUITAS	30,451,788,657	30,829,082,886	(377,294,229)	(1.22)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	30,468,650,871	30,843,075,900	(374,425,029)	(1.21)

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 5 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris Pengadilan Militer Utama

Nuratiah
 Nuratiah, S.H., M.H.
 Pembina Utama Muda 197109051998032005

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (663161) PENGADILAN MILITER UTAMA

Tgl Data : 05/05/25 8:49 AM
Tgl Cetak : 05/05/25 3:24 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	0
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	0
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	0
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	0
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	0
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	0
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	0
Pendapatan Cukai	0	0	0	0
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	0
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	0
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	0
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	0
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	26,173,720	20,885,000	5,288,720	25.323
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	26,173,720	20,885,000	5,288,720	25.323
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	0
Pendapatan Hibah	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan	26,173,720	20,885,000	5,288,720	25.323
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	0
Beban Pegawai	3,802,989,293	3,447,760,801	355,228,492	10.303
Beban Persediaan	63,360,037	2,929,796,250	(2,866,436,213)	(97.837)
Beban Barang dan Jasa	1,297,631,607	1,335,934,513	(38,302,906)	(2.867)
Beban Pemeliharaan	802,636,425	701,114,905	101,521,520	14.48
Beban Perjalanan Dinas	107,650,741	116,834,369	(9,183,628)	(7.86)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0

**LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (663161) PENGADILAN MILITER UTAMA

Tgl Data : 05/05/25 8:49 AM

Tgl Cetak : 05/05/25 3:24 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0
Beban Subsidi	0	0	0	0
Beban Hibah	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	387,428,759	392,528,484	(5,099,725)	(1.299)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	0
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	0
Beban Lain-Lain	0	0	0	0
JUMLAH BEBAN	6,461,696,862	8,923,969,322	(2,462,272,460)	(27.592)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(6,435,523,142)	(8,903,084,322)	2,467,561,180	(27.716)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	0
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	16,400,000	0	16,400,000	
Pendapatan Pelepasan Aset	16,400,000	0	16,400,000	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	0
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	16,400,000	0	16,400,000	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(6,419,123,142)	(8,903,084,322)	2,483,961,180	(27.9)
POS LUAR BIASA	0	0	0	0
Beban Luar Biasa	0	0	0	0
POS LUAR BIASA	0	0	0	0
SURPLUS/DEFISIT - LO	(6,419,123,142)	(8,903,084,322)	2,483,961,180	(27.9)

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 5 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Sekretaris Pengadilan Militer Utama



Nuratiah, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (663161) PENGADILAN MILITER UTAMA

Tgl Data : 05/05/25 12:25 PM

Tgl Cetak : 05/05/25 3:24 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	30,829,082,886	30,987,194,898	(158,112,012)	(0.51)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(6,419,123,142)	(8,903,084,322)	2,483,961,180	(27.9)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	6,041,828,913	8,744,972,310	(2,703,143,397)	(30.91)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(377,294,229)	(158,112,012)	(219,182,217)	138.62
EKUITAS AKHIR	30,451,788,657	30,829,082,886	(377,294,229)	(1.22)

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 5 Mei 2025
 Penanggung Jawab UAKPA
 Sekretaris Pengadilan Militer Utama

Nuratiah, S.H., M.H.
 Pembina Utama Muda

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 005	MAHKAMAH AGUNG	Kode Lap : LRA.B.S.2
ESELON I	: 01	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	Tanggal : 05/05/25 3:26 PM
WILAYAH/PROVINSI	: 0100	DKI JAKARTA	Halaman : 1
SATUAN KERJA	: 663161	PENGADILAN MILITER UTAMA	Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
JENIS SATUAN KERJA	: KD		Tgl Data : 5/5/25 10:49 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	704,406,000	838,027,000	837,444,220	0	837,444,220	99.93	582,780
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	8,000	19,000	15,525	380	15,145	79.71	3,855
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	42,281,000	56,606,000	56,604,104	0	56,604,104	100	1,896
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	10,327,000	15,169,000	15,167,034	0	15,167,034	99.99	1,966
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	42,336,000	107,348,000	107,240,000	0	107,240,000	99.9	108,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	6,720,000	6,720,000	6,720,000	0	6,720,000	100	0
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	3,640,000	8,552,000	8,447,825	0	8,447,825	98.78	104,175
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	30,282,000	48,282,000	46,566,060	0	46,566,060	96.45	1,715,940
511129	Belanja Uang Makan PNS	91,476,000	146,476,000	140,639,000	0	140,639,000	96.02	5,837,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	18,889,000	33,256,000	32,500,000	0	32,500,000	97.73	756,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	950,365,000	1,260,455,000	1,251,343,768	380	1,251,343,388	99.28	9,111,612
5112	Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri							
511224	Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI	2,538,370,000	2,085,580,000	2,085,580,000	18,200,000	2,067,380,000	99.13	18,200,000
511225	Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	431,350,000	294,350,000	293,646,181	0	293,646,181	99.76	703,819
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5112	2,969,720,000	2,379,930,000	2,379,226,181	18,200,000	2,361,026,181	99.21	18,903,819
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	126,000,000	135,000,000	134,551,200	0	134,551,200	99.67	448,800
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	10,000	10,000	1,964	0	1,964	19.64	8,036
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	4,200,000	4,700,000	4,485,040	0	4,485,040	95.43	214,960
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	21,800,000	22,000,000	21,742,000	0	21,742,000	98.83	258,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4,100,000	4,100,000	4,055,520	0	4,055,520	98.92	44,480
511628	Belanja Uang Makan PPPK	28,800,000	28,800,000	22,311,000	0	22,311,000	77.47	6,489,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	184,910,000	194,610,000	187,146,724	0	187,146,724	96.17	7,463,276
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	4,104,995,000	3,834,995,000	3,817,716,673	18,200,380	3,799,516,293	99.07	35,478,707
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,042,092,000	1,052,524,000	1,050,402,108	0	1,050,402,108	99.8	2,121,892
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	27,600,000	15,900,000	15,433,980	0	15,433,980	97.07	466,020
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	43,488,000	43,488,000	43,488,000	0	43,488,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	10,560,000	1,152,000	1,143,500	0	1,143,500	99.26	8,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,123,740,000	1,113,064,000	1,110,467,588	0	1,110,467,588	99.77	2,596,412
5218	Belanja Barang Persediaan							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 005	MAHKAMAH AGUNG	Kode Lap : LRA.B.S.2
ESELON I	: 01	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	Tanggal : 05/05/25 3:26 PM
WILAYAH/PROVINSI	: 0100	DKI JAKARTA	Halaman : 2
SATUAN KERJA	: 663161	PENGADILAN MILITER UTAMA	Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
JENIS SATUAN KERJA	: KD		Tgl Data : 5/5/25 10:49 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	60,340,000	63,550,000	63,263,767	0	63,263,767	99.55	286,233
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	60,340,000	63,550,000	63,263,767	0	63,263,767	99.55	286,233
5221	Belanja Jasa							
522112	Belanja Langganan Telepon	30,000,000	2,550,000	2,546,669	0	2,546,669	99.87	3,331
522113	Belanja Langganan Air	36,000,000	19,932,000	19,862,740	0	19,862,740	99.65	69,260
522141	Belanja Sewa	172,440,000	159,660,000	159,658,410	0	159,658,410	100	1,590
522191	Belanja Jasa Lainnya	2,400,000	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	240,840,000	183,342,000	183,267,819	0	183,267,819	99.96	74,181
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	264,960,000	391,600,000	391,385,300	0	391,385,300	99.95	214,700
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	406,037,000	412,286,000	411,251,125	0	411,251,125	99.75	1,034,875
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	670,997,000	803,886,000	802,636,425	0	802,636,425	99.84	1,249,575
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	54,128,000	78,808,000	78,707,547	0	78,707,547	99.87	100,453
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21,600,000	16,950,000	16,950,000	0	16,950,000	100	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	12,045,000	11,993,194	0	11,993,194	99.57	51,806
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	75,728,000	107,803,000	107,650,741	0	107,650,741	99.86	152,259
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,171,645,000	2,271,645,000	2,267,286,340	0	2,267,286,340	99.81	4,358,660
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	17,982,000	17,600,000	0	17,600,000	97.88	382,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	0	17,982,000	17,600,000	0	17,600,000	97.88	382,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	0	17,982,000	17,600,000	0	17,600,000	97.88	382,000
	JUMLAH BELANJA	6,276,640,000	6,124,622,000	6,102,603,013	18,200,380	6,084,402,633	99.34	40,219,367

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 01 **BADAN URUSAN ADMINISTRASI**
WILAYAH/PROVINSI : 0100 **DKI JAKARTA**
SATUAN KERJA : 663161 **PENGADILAN MILITER UTAMA**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
 Tanggal : 05/05/25 3:26 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	16,400,000	0	16,400,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	25,251,000	26,173,720	0	26,173,720	103.65
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	25,251,000	42,573,720	0	42,573,720	168.6
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	25,251,000	42,573,720	0	42,573,720	168.6
	JUMLAH PENDAPATAN	25,251,000	42,573,720	0	42,573,720	168.6

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (663161) PENGADILAN MILITER UTAMA

Tgl Data : 05/05/25 8:49 AM

Tgl Cetak : 05/05/25 3:25 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akhir_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	5,626,730	0
0.0	131111	Tanah	25,234,342,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	6,592,096,332	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	5,806,817,600	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	6,940,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	6,167,568,956
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,009,602,835
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	14,805,000
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	2,057,214
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	6,084,402,633
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	42,573,720	0
0.0	391111	Ekuitas	0	30,829,082,886
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	16,400,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	26,173,720
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	837,444,220	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	15,145	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	56,604,104	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	15,167,034	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	107,240,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	6,720,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	8,447,825	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	46,566,060	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	144,075,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	32,500,000	0
3.0	511224	Beban Tunj. Fungsional TNI/POLRI	2,067,380,000	0
3.0	511225	Beban Tunj. PPh TNI/POLRI	293,646,181	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	134,551,200	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	1,964	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	4,485,040	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	21,742,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	4,055,520	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	22,348,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,050,182,108	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	15,433,980	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	43,488,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	1,143,500	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	2,553,369	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	19,472,240	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (663161) PENGADILAN MILITER UTAMA

Tgl Data : 05/05/25 8:49 AM

Tgl Cetak : 05/05/25 3:25 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522141	Beban Sewa	164,158,410	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	1,200,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	391,385,300	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	411,251,125	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	78,707,547	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	16,950,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	11,993,194	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	252,295,949	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	135,132,810	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	63,360,037	0
JUMLAH			44,150,093,244	44,150,093,244

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 5 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris Pengadilan Militer Utama

Nuratiah, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (663161) PENGADILAN MILITER UTAMA

Tgl Data : 05/05/25 12:25 PM

Tgl Cetak : 05/05/25 3:25 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	6,084,402,633
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	42,573,720	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	16,400,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	26,173,720
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	837,444,220	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	15,525	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	56,604,104	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	15,167,034	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	107,240,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	6,720,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	8,447,825	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	46,566,060	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	140,639,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	32,500,000	0
3.0	511224	Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI	2,085,580,000	0
3.0	511225	Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	293,646,181	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	134,551,200	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,964	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	4,485,040	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	21,742,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4,055,520	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	22,311,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,050,402,108	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	15,433,980	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	43,488,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,143,500	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	63,263,767	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	2,546,669	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	19,862,740	0
3.0	522141	Belanja Sewa	159,658,410	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	1,200,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	391,385,300	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	411,251,125	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	78,707,547	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16,950,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	11,993,194	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17,600,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	380

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (663161) PENGADILAN MILITER UTAMA

Tgl Data : 05/05/25 12:25 PM

Tgl Cetak : 05/05/25 3:25 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	511224	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI	0	18,200,000
JUMLAH			6,145,176,733	6,145,176,733

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 5 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris Pengadilan Militer Utama

Nuratiah, S.H., M.H.
197109051998032005

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (663161) PENGADILAN MILITER UTAMA

Tgl Data : 08/05/24 6:26 AM

Tgl Cetak : 08/05/24 8:57 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114112	Beban barang yang dibayar di muka (prepaid)	4,500,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	5,723,000	0
0.0	131111	Tanah	25,234,342,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	6,574,496,332	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	5,806,817,600	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	6,940,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	5,915,273,007
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	874,470,025
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	388,627,800	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	388,627,800
0.0	212111	Beban pegawai yang masih harus dibayar	0	11,332,000
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	2,661,014
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	5,780,301,260
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	20,885,000	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	2,985,556,050
0.0	391111	Ekuitas	0	30,987,194,898
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	20,885,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	718,223,260	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	11,776	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	44,225,946	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	12,876,304	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	107,240,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1,920,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	3,320,869	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	40,482,780	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	127,364,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	28,195,000	0
3.0	511224	Beban Tunj. Fungsional TNI/POLRI	2,016,520,000	0
3.0	511225	Beban Tunj. PPh TNI/POLRI	334,491,895	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	8,899,500	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	141	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	296,650	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	1,553,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	289,680	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	1,850,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,035,560,140	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	11,494,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	83,604,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (663161) PENGADILAN MILITER UTAMA

Tgl Data : 08/05/24 6:26 AM

Tgl Cetak : 08/05/24 8:57 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akhir_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	2,557,359	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	10,095,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	2,942,374	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	20,041,640	0
3.0	522141	Beban Sewa	167,340,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	2,300,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	300,128,100	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	400,986,805	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	86,057,149	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	14,850,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9,402,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6,525,220	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	257,395,674	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	135,132,810	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	2,929,796,250	0
JUMLAH			46,966,301,054	46,966,301,054

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 8 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris Pengadilan Militer Utama



Nuratiah, S.H., M.H.

197109051998032005

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (663161) PENGADILAN MILITER UTAMA

Tgl Data : 08/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 08/05/24 8:57 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	5,780,301,260
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	20,885,000	0
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	20,885,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	718,223,260	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12,457	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	44,225,946	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	12,876,304	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	107,240,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,920,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	3,320,869	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	40,482,780	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	129,883,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	28,195,000	0
3.0	511224	Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI	2,016,520,000	0
3.0	511225	Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	334,491,895	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	8,899,500	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	141	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	296,650	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1,553,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	289,680	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,035,340,140	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	11,494,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	83,604,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	2,557,359	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	10,095,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	63,208,000	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	3,027,246	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	19,856,440	0
3.0	522141	Belanja Sewa	171,840,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	2,300,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	300,128,100	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	400,986,805	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	86,057,149	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14,850,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9,402,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6,525,220	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110,600,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	681

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (663161) PENGADILAN MILITER UTAMA

Tgl Data : 08/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 08/05/24 8:57 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
		JUMLAH	5,801,186,941	5,801,186,941

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 8 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris Pengadilan Militer Utama



Nuratilah, S.H., M.H.
197109051998032005

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2024 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005

MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : 01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : 0100

DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : 663161

PENGADILAN MILITER UTAMA

Tgl. Cetak 05/05/2025 3:27 PM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	4,500,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	5,723,000	0
0.0	131111	Tanah	25,234,342,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	6,574,496,332	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	5,806,817,600	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	6,940,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	5,915,273,007
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	874,470,025
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	388,627,800	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	388,627,800
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	11,332,000
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	2,661,014
0.0	391111	Ekuitas	0	30,829,082,886
JUMLAH			38,021,446,732	38,021,446,732

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga	:	005	MAHKAMAH AGUNG RI
Eselon	:	01	UNIT ESELON I BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Wilayah	:	0100	DKI JAKARTA
Satuan Kerja	:	663161	Pengadilan Militer Utama
No. Dokumen	:	001 s/d 005	
Tanggal	:	31 Desember 2024	
Tahun Anggaran	:	2024	
Keterangan	:	Belanja Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2024	

Kategori Jurnal Penyesuaian

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima Dimuka | <input type="checkbox"/> Koreksi Antar Beban |
| <input type="checkbox"/> Pendapatan Yang Masih Harus Diterima | <input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| <input type="checkbox"/> Belanja Dibayar Di Muka | <input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| <input checked="" type="checkbox"/> Belanja Yang Masih Harus Dibayar | <input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Panjang |
| <input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang | <input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Pendek |
| <input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang | <input type="checkbox"/> Transfer Masuk |
| <input type="checkbox"/> Penyusutan Aset | <input type="checkbox"/> Transfer Keluar |
| <input type="checkbox"/> Kas Di Bendaharan Penerimaan | <input type="checkbox"/> Reklasifikasi Neraca |
| <input type="checkbox"/> Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran | <input type="checkbox"/> Koreksi |
| <input type="checkbox"/> Persediaan | <input type="checkbox"/> |

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	511129	Beban Uang Makan PNS BRI	11.585.000	
	K	212111	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar		11.585.000
2	D	511129	Beban Uang Makan PNS BSI	1.333.000	
	K	212111	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar		1.333.000
3	D	511628	Beban Uang Makan PPPK	1.887.000	
	K	212112	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar		1.887.000
4	D	522112	Beban Langganan Telepon	144.572	
	K	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		144.572
5	D	522113	Beban Langganan Air	1.840.270	
	K	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		1.840.270
6	D	522112	Beban Langganan Telepon	72.372	
	K	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		72.372

Diisi oleh :

Tanggal :

Kasusdag Keuangan dan Pelaporan

Dwi Mulyanto, S.E., M.M.
NIP.198109202006041007



Disetujui oleh

Tanggal :

Sekretaris

Nuratian, S.H., M.H.
NIP. 197109051998032005

Direkam oleh

Tanggal :

Operator GLP

Try Susanti, S.E.
NIP.199506062020122005

KARTU RINCIAN NILAI UTANG KEPADA PIHAK KETIGA (BELANJA YANG MASIH HARUS DIBAYAR)

per 31 DESEMBER 2024

K/L : (005) Mahkamah Agung
 BAES1 : (01) Badan Urusan Administrasi
 Wilayah : (0100) DKI Jakarta
 Satuan Kerja : (663161) Pengadilan Militer Utama

No	KODE WILAYAH	WILAYAH	KODE SATKER	SATKER	TA	AKUN	URAIAN	BELANJA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	DOKUMEN SUMBER	KETERANGAN
1	0100	DKI Jakarta	663161	Pengadilan Militer Utama	2024	511129	Belanja Uang Makan PNS	11.585.000	SP2D NO: 251751301000028 /SPM NO: 00009T TANGGAL 07-01-2025	Uang Makan PNS Bulan Desember 2024
2	0100	DKI Jakarta	663161	Pengadilan Militer Utama	2024	511129	Belanja Uang Makan PNS	1.333.000	SP2D NO: 251751305000016 /SPM NO: 00010T TANGGAL 07-01-2025	Uang Makan PNS Bulan Desember 2024
3	0100	DKI Jakarta	663161	Pengadilan Militer Utama	2024	511628	Belanja Uang Makan PPPK	1.887.000	SP2D NO: 251751301000108 /SPM NO: 00015T TANGGAL 10-01-2025	Uang Makan PPPK Bulan Desember 2024
4	0100	DKI Jakarta	663161	Pengadilan Militer Utama	2024	522112	Belanja Langganan Telepon	144.572	Kwitansi 00007/KW/663161/2025 SP2D NO: 251751301000586 /SPM NO: 00025T TANGGAL 23-01-2025	Tagihan Telepon Bulan Januari 2025 (GUP)
5	0100	DKI Jakarta	663161	Pengadilan Militer Utama	2024	522113	Belanja Langganan Air	1.840.270	Kwitansi 00008/KW/663161/2025 SP2D NO: 251751301000586 /SPM NO: 00025T TANGGAL 23-01-2025	Tagihan Air PAM Bulan Januari 2025
6	0100	DKI Jakarta	663161	Pengadilan Militer Utama	2024	522112	Belanja Langganan Telepon	72.372	SP2D NO: 251751301000197 /SPM NO: 00017T TANGGAL 13-01-2025	Tagihan Telepon Bulan Januari 2025 (LS)
JUMLAH TOTAL								16.862.214		

Jakarta, 24 Januari 2025

Sekretaris

upati

Nuratiani, S.H., M.H.
NIP. 197109051998032005



DAFTAR REKENING BANK (BENDAHARA PENGELUARAN, REKENING LAINNYA/ BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA)
PENGADILAN MILITER UTAMA
31 DESEMBER 2024

No.	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Rekening Atas Nama	Bank / Kantor Pos	Surat Izin		TNP / NON TNP	Saldo Akhir per 30 Juni 2024 (Rp.)
									Nomor	Tanggal		
1	Pengadilan Militer Utama	005	01	Virtual	653246631611000	BPG175 Pengadilan Militer Utama 663161	Pengadilan Militer Utama	BRI Cabang Jakarta Jatinegara	S- 985/WPB.12/KP.06/2021	07-06-2021		Rp -
2	Pengadilan Militer Utama	005	05	Virtual	651556631621000	BPG175 Pengadilan Militer Utama 663162	Pengadilan Militer Utama	BRI Cabang Jakarta Jatinegara	S-549/PB.3/2021	26-03-2021		Rp -

Jakarta, 25 Februari 2025
 Sekretaris

 Nuratiah, S.H., M.H.
 NIP. 197109051998032005

MONITORING PENUTUPAN REKENING BANK PADA PENGADILAN MILITER UTAMA
TAHUN 2024

No.	Satuan Kerja	Nomor Rekening	Bank	Tgl Penutupan	Saldo yang disetor	Tgl dan Surat Bank	Keterangan
TIDAK ADA							

Jakarta, 25 Februari 2025
Sekretaris

Nuratiah, S.H., M.H.
NIP. 197109051998032005



Rincian Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran

BA : (005) Mahkamah Agung
 Eselon I : (01) Badan Urusan Administrasi
 Wilayah : (0100) DKI Jakarta
 Satuan Kerja : (663161) Pengadilan Militer Utama

No.	Kode Wilayah	Nama Wilayah	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Per 31 Desember 2024			Total	Ket		
					Tunai	Saldo Bank					
						Saldo	Bank dan No Rek				
1	0100	DKI Jakarta	663161	Pengadilan Militer Utama	-	-	BRI Cabang Jakarta Jatinegara 653246631611000	-			
Total					-	-	-	-			



Rincian Nilai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

BA : (005) Mahkamah Agung
 Eselon I : (01) Badan Urusan Administrasi
 Wilayah : (0100) DKI Jakarta
 Satuan Kerja : (663161) Pengadilan Militer Utama

No.	Kode Wilayah	Nama Wilayah	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Per 31 Desember 2024				Ket	
					Tunai	Saldo Bank		Total		
						Saldo	Bank dan No Rek			
1	0100	DKI Jakarta	663161	Pengadilan Militer Utama	-	-	-	-	-	
Total					-	-	-	-	-	



Rincian Nilai Kas di Bendahara Penerimaan

BA : (005) Mahkamah Agung
 Eselon I : (01) Badan Urusan Administrasi
 Wilayah : (0100) DKI Jakarta
 Satuan Kerja : (663161) Pengadilan Militer Utama

No.	Kode Wilayah	Nama Wilayah	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Per 31 Desember 2024			Total	Ket		
					Tunai	Saldo Bank					
						Saldo	Bank dan No Rek				
1	0100	DKI Jakarta	663161	Pengadilan Militer Utama	-	-	-	-	-		
Total					-	-	-	-	-		



Rincian Nilai Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan

BA : (005) Mahkamah Agung
 Eselon I : (01) Badan Urusan Administrasi
 Wilayah : (0100) DKI Jakarta
 Satuan Kerja : (663161) Pengadilan Militer Utama

No.	Kode Wilayah	Nama Wilayah	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Per 31 Desember 2024			Ket	
					Tunai	Saldo Bank			
						Saldo	Bank dan No Rek		
1	0100	DKI Jakarta	663161	Pengadilan Militer Utama	-	-	-	-	
					-	-	-	-	
Total					-	-	-	-	

Jakarta, 25 Februari 2025
 Sekretaris

 Nuratjah, S.H., M.H.
 NIP. 197109051998032005

DAFTAR PERHITUNGAN PIUTANG BUKAN PAJAK DAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH PIUTANG PNBP
PER 31 DESEMBER 2024

BA : (005) Mahkamah Agung

Eselon I : (01) Badan Urusan Administrasi

Wilayah : (0100) DKI Jakarta

Satuan Kerja : (663161) Pengadilan Militer Utama

No.	Nama Debitur	Uraian	Piutang PNBP	Nilai Agunan/ Sitaan Yang Diperhitungkan	Saldo Piutang Setelah Agunan/ Sitaan	Penyisihan Piutang				Jumlah Saldo Akhir	Ket
						0.5% (lancar)	10% (Kurang Lancar)	50% (Diragukan)	100% (Macet)		
TIDAK ADA											
						-	-	-	-		
Total											

Jakarta, 25 Februari 2025

Sekretaris



Nuratiah, S.H., M.H.
NIP. 197109051998032005

KARTU RINCIAN NILAI PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
PER 31 DESMBER 2024

BA : (005) Mahkamah Agung
Eselon I : (01) Badan Urusan Administrasi
Wilayah : (0100) DKI Jakarta
Satuan Kerja : (663161) Pengadilan Militer Utama

No.	URAIAN	NILAI SSBP	JANGKA WAKTU (Bulan)	TMT	JATUH TEMPO	DALUWARSA		PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
						S.d. 31 DESEMBER 2024	TAHUN BERJALAN 2024	
1	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								



DAFTAR REKAPITULASI PENJELASAN SALDO NERACA AKRUAL
PER 31 DESEMBER 2024

BA : (005) Mahkamah Agung
 Eselon I : (01) Badan Urusan Administrasi
 Wilayah : (0100) DKI Jakarta
 Satuan Kerja : (663161) Pengadilan Militer Utama

No	KODE WILAYAH	WILAYAH	KODE SATKER	SATKER	TA	KODE AKUN	URAIAN	PENJELASAN
1	0100	DKI Jakarta	663161	Pengadilan Militer Utama	2024	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar;	Uang Makan PNS dan PPPK Bulan Desember 2024 Rp14.805.000
2	0100	DKI Jakarta	663161	Pengadilan Militer Utama	2024	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar;	Tagihan Telepon dan Air Bulan Januari 2025 atas Pemakaian Desember 2024 Rp2.057.214

Jakarta, 25 Februari 2025
 Sekretaris

 Nuratih, S.H., M.H.
 NIP. 197109051998032005



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER UTAMA

Jalan Raya Penggilingan, RT 10 RW 4, Penggilingan, Kec. Cakung
Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13940, www.dilmiltama.go.id, admin@dilmiltama.go.id

BERITA ACARA OP NAME FISIK (STOCK OPNAME) PERSEDIAAN
PENGADILAN MILITER UTAMA
005.01.0100.663161.000.KD

Nomor : /6 /SEK.PMU/KU2/I/2025

Pada hari ini, Jumat Tanggal 3 Bulan Januari Tahun 2025, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Nuratiah, S.H., M.H.
NIP : 197109051998032005
Jabatan : **Kuasa Pengguna Anggaran / Barang**
2. Nama : Kapten Chk Thomas Willem R Imbiri, S.E., S.H.
NRP : 21930118770373
Jabatan : **Kasubbag TU Dan Rumga**
3. Nama : Try Susanti, S.E.
NRP : 199506062020122005
Jabatan : **Pengelola Keuangan**
4. Nama : Herdian Syahfrudin, A.Md.T.
NIP : 199412292019031006
Jabatan : **Operator Persediaan**

Menyatakan bahwa telah melakukan **Stock Opname** barang persediaan Bulan Desember Tahun 2024, sebagaimana terlampir dalam lampiran berita acara opname fisik (**Stock Opname**). Adapun total Nilai Barang per 31 Desember 2024 meliputi ;

- a. Barang Konsumsi : Rp. 5.626.730,00
- b. Amunisi :
- c. Bahan Untuk Pemeliharaan :
- d. Suku Cadang :
- e. Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga :
- f. Pita Cukai dan Leges :
- g. Bahan Baku :
- h. Barang Dalam Proses / Setengah Jadi :
- i. Tanah / Bangunan Untuk Dijual :
- j. Hewan dan tanaman untuk dijual :
- k. Total : **Rp. 5.626.730,00**

Demikian Berita Acara Persediaan ini dibuat untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Stock Opname :

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Nuratiah, S.H., M.H. | Kuasa Pengguna Anggaran/Barang |
| 2. Thomas W R Imbiri, S.E., S.H. | Kasubbag TU Dan Rumga |
| 3. Try Susanti, S.E. | Pengelola Keuangan |
| 4. Herdian Syahfrudin, A.Md.T. | Operator Persediaan |



UPPB-Eselon I : SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG
 UPPB-Eselon II : PENGADILAN MILITER UTAMA

LAPORAN HASIL INVENTARISASI BARANG PERSEDIAN (STOCK OPNAME)

Kode Satuan Kerja : 005.01.0100.663161.000.KD

Nama Satuan Kerja : Pengadilan Militer Utama

No	Kode Barang	Nama Barang	Type / Merk	Tahun Perolehan	Kuantitas Barang			Satuan	Harga Satuan (Rp)	TOTAL	Kondisi Barang			Ket
					Menurut Administrasi	Hasil Inventaris	Selisih				B	R	U	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12		13
1	000057	stabilo	BOSS	2024	3	3	0	Pak	5,000	15,000	✓			
2	000058	Boldliner Hitam	STANDARD	2024	2	2	0	Pak	165,945	331,890	✓			
3	000059	Boldliner Biru	STANDARD	2024	2	2	0	Pak	165,945	331,890	✓			
4	000060	Pulpen Standart Hitam (Pack)	SQUEZY	2024	5	5	0	Pak	26,168	130,840	✓			
5	000003	Tinta Stempel (Pcs)		2024	3	3	0	Pak	12,765	38,295	✓			
6	000009	Tipe x kenko	KENKO	2024	1	1	0	Pcs	54,000	54,000	✓			
7	000042	Box File (pes)	BANTEX	2024	6	6	0	Botol	34,465	206,790	✓			
8	000043	Map Kabita (dus)	KABITA	2024	2	2	0	Pak	79,143	158,286	✓			
9	000044	Map Snelhecter (Pack)	JENIA	2024	2	2	0	Pak	31,913	63,826	✓			
10	000045	Map Ziper (Pcs)		2024	6	6	0	Pcs	19,147	114,882	✓			
11	000046	Odner Benex (Pcs)	BANTEX	2024	10	10	0	Pcs	25,530	255,300	✓			
12	000047	Business File Jenia	JENIA	2024	2	2	0	Dus	24,254	48,508	✓			
13	000002	CUTTER JOYKO L-500	JOYKO	2024	1	1	0	Pcs	14,700	14,700	✓			
14	000008	Isi Cutter L 150 (Besar)	JOYKO	2024	3	3	0	Pak	5,000	15,000	✓			
15	000028	Staples Jk HD 50	JOYKO	2024	2	2	0	Pcs	17,500	35,000	✓			
16	000025	Kertas F4 BMO 75gr	BMO	2024	20	20	0	Rim	74,037	1,480,740	✓			
17	000026	Kertas A4 BMO 75gr	BMO	2024	20	20	0	Rim	59,996	1,199,920	✓			
18	000030	Post it (Besar)		2024	5	5	0	Pcs	25,530	127,650	✓			
19	000019	TONER 85A	HP	2024	1	1	0	Pcs	120,000	120,000	✓			
20	000029	Tinta Epson 664 Black	EPSON	2024	1	1	0	Botol	95,000	95,000	✓			
21	000030	Tinta Epson 664 Magenta	EPSON	2024	1	1	0	Botol	95,000	95,000	✓			
22	000031	Tinta Epson 664 Cyan	EPSON	2024	1	1	0	Botol	95,000	95,000	✓			
23	000032	Tinta Epson 664 Yellow	EPSON	2024	1	1	0	Botol	95,000	95,000	✓			
24	000006	Sandisk 64GB	SANDISK	2024	4	4	0	Pcs	95,737	382,948	✓			
25	000005	Baterai Alkaline AAA (Pack)	ABC	2024	5	5	0	Botol	7,659	38,295	✓			
26	000006	Baterai Alkaline AA (Pack)	ABC	2024	5	5	0	Botol	16,594	82,970	✓			

				Jumlah								5,626,730			

Jakarta, Januari 2025

Pengurus Persediaan

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Herdian Syahfrudin". A small 'S' is written above the right side of the signature.

Herdian Syahfrudin, A.Md.T.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER UTAMA

Jalan Raya Penggilingan, RT 10 RW 4, Penggilingan, Kec. Cakung
Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13940, www.dilmiltama.go.id, admin@dilmiltama.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA
PADA PENGADILAN MILITER UTAMA
TA. 2024

Pada hari Senin tanggal Enam Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Jakarta. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Herdian Syahfrudin, A.Md.T.

NIP : 199412292019031006

Jabatan : OPERATOR ASET

Untuk ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Pengadilan Militer Utama untuk selanjutnya disebut Pihak pertama.

2. Nama : Try Susanti, S.E.

NIP : 199506062020122005

Jabatan : OPERATOR GLP

Untuk ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi Keuangan pada Pengadilan Militer Utama untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN :

Akun Neraca		Jumlah
Kode	Uraian	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	5.626.730
131111	Tanah	25.234.342.000
132111	Peralatan dan Mesin	6.592.096.332
133111	Gedung dan Bangunan	5.806.817.600
135121	Aset Tetap Lainnya	6.940.000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(6.167.568.956)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.009.602.835)
Jumlah		30.468.650.871

II. Hal-hal lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBP/KP dan LKPP disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP TA 2024, dan apabila dikemudian hari terdapat, kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petugas GLP

Try Susanti, S.E.
NIP 199506062020122005

Petugas ASET

Herdian Syahfrudin, A.Md.T.
NIP 199412292019031006

Mengetahui,
Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran



Nuratiah, S.H., M.H.
NIP 197109051998032005



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 49/SEK/SK.PL1.2/I/2024

TENTANG

**PENETAPAN PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA
BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
PADA PENGADILAN MILITER UTAMA**

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa terdapat permohonan penetapan pelaksanaan sewa pada Pengadilan Militer Utama sebagaimana surat Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor 1043/KPMU/PL1.2.1/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 hal Permohonan Pendeklegasian Wewenang Sewa Atas Barang Milik Negara Berupa Tanah pada Pengadilan Militer Utama;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemanfaatan Barang Milik Negara yang akan disewakan, perlu diadakan penetapan pelaksanaan sewa terhadap Barang Milik Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. tentang Penetapan Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara pada Pengadilan Militer Utama.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;

5. Keputusan...

5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1681/SEK/SK.PL1.2/XII/2023 tentang Pendeklegasian Wewenang Permohonan Usulan Sewa Barang Milik Negara (Non Rumah Negara) Kepada Pejabat Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
6. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengelolaan Sewa Barang Milik Negara Non Rumah Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
7. Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I Nomor S-1/MK.6/KNL.0701/2024 tanggal 2 Januari 2024 perihal Persetujuan Sewa Atas Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah pada Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA PENGADILAN MILITER UTAMA.

- KESATU : Menetapkan Barang Milik Negara pada Pengadilan Militer Utama untuk disewakan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Perjanjian sewa ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang dan Penyewa, bersamaan dengan tanggal bayar pada Bukti Penerimaan Negara (BPN).
- KETIGA : Penyewaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa yang memuat hak dan kewajiban para pihak yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang dan pihak Penyewa.
- KEEMPAT : Dalam hal Penyewa mengajukan permintaan perpanjangan jangka waktu sewa, maka permintaan tersebut harus disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jangka waktu sewa untuk periodesitas tahunan.
- KELIMA : Laporan pelaksanaan sewa agar disampaikan kepada Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Kepala Biro Perlengkapan dan Menteri Keuangan R.I., c.q Direktur Jenderal Kekayaan Negara c.q. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I dengan dilampiri Surat Keputusan Penetapan Harga Sewa, bukti setor dan perjanjian sewa menyewa.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada 12 Januari 2024

Plt. SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



SUGIYANTO

Tembusan:

1. Kepala Pengadilan Militer Utama;
2. Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I;
4. Sekretaris Pengadilan Militer Utama untuk dilaksanakan/ dilaporkan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung

Republik Indonesia

Nomor : 49/SEK/SK.PL1.2/1/2024

Tanggal : 12 Januari 2024

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DISETUJUI UNTUK DISEWA
PADA PENGADILAN MILITER UTAMA

NO	KODE BARANG	NUP	JENIS BMN	LOKASI	PENYEWA	LUAS YANG DISEWAKAN (M ²)	JANGKA WAKTU	PERIODESITAS	NILAI SEWA (RP)	PERUNTUKAN SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2010104001	1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jalan Raya Penggilingan, RT.5/RW.3, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	6	2 (dua) tahun	per tahun	25.251.000	Penempatan Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	Nilai Sewa senilai Rp25.251.000,00 per tahun, tidak termasuk biaya listrik, air, dan biaya operasional lainnya. Biaya listrik ditanggung sendiri oleh penyewa, sesuai dengan Surat Keterangan Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Militer Utama Nomor 1189/SEKPMU/B/PL1.2.1/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023
JUMLAH										25.251.000	

Plt. SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



SUGIYANTO



Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : S-1/MK.6/KNL.0701/2024 2 Januari 2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Persetujuan Sewa atas Barang Milik Negara berupa Sebagian Tanah pada Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yth. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
u.p. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesias
Jl. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Jakarta 10110

Sehubungan dengan surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 478/SEK/PL1.2/XI/2023 tanggal 17 November 2023 hal Permohonan Persetujuan Sewa Barang Milik Negara berupa Tanah pada Pengadilan Militer Utama, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan sewa Barang Milik Negara pada Pengadilan Militer Utama berupa sebagian tanah seluas 6m² yang terletak di Jalan Raya Penggilingan, RT.5/ RW.3, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, dengan total nilai perolehan BMN secara proporsional sebesar Rp50.468.684,00 (lima puluh juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui.

Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan sewa tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 213/KM.6/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Barang Milik Negara dimaksud disewakan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk jangka waktu sewa selama 2 (dua) tahun dengan nilai sewa total Rp50.502.000,00 (lima puluh juta lima ratus dua ribu rupiah) atau nilai sewa per tahun sebagaimana rincian terlampir.
2. Berdasarkan persetujuan sewa ini, agar Saudara menetapkan keputusan perjanjian sewa paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan yang tembusannya disampaikan kepada Pengelola Barang (Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I), yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan, besaran tarif sewa, jangka waktu sewa termasuk periodesitas sewa, dan identitas penyewa.
3. Penyewaan Barang Milik Negara tersebut dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa yang memuat hak dan kewajiban para pihak dan ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan pihak penyewa setelah seluruh pembayaran uang sewa disetorkan ke rekening kas umum negara dan bukti setoran dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian sewa menyewa.
4. Dalam hal penyewa mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa, maka permohonan tersebut harus disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

2

5. Laporan pelaksanaan sewa yang dilengkapi dengan fotokopi perjanjian sewa menyewa dan bukti setor pembayaran sewa ke rekening Kas Umum Negara agar disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I selaku Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Guna mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Negara, agar Saudara melakukan penatausahaan, pembinaan, dan pengawasan atas pelaksanaan sewa Barang Milik Negara dimaksud.
7. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara Dan Lelang
Jakarta I



Ditandatangani secara elektronik
Roffii Edy Purnomo

Tembusan:

1. Menteri Keuangan (sebagai laporan);
2. Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Kepala Pengadilan Militer Utama;
4. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara DJKN; dan
5. Kepala Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta.



Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I, Jalan Prajurit KKO Usman Harun Nomor 10, Jakarta Pusat 10410
Telepon (021) 34835131, Faksimile (021) 34835131



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Surat Menteri Keuangan
Nomor : S-1/MK.6/KNL.0701/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN PADA MAHKAMAH AGUNG RI
YANG DISETUJUI UNTUK DISEWAKAN**

No.	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Lokasi	Penyewa	Luas yang Disewakan (m ²)	Jangka Waktu	Periodesitas	Nilai Sewa (Rp)	Peruntukan Sewa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2010104001	1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jalan Raya Penggilingan, RT.5/RW.3, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	6	2 (dua) tahun	per tahun	25.251.000,00	Penempatan Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

a.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta I



Ditandatangani secara elektronik
Rofii Edy Purnomo



SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA ATM
a n t a r a
PENGADILAN MILITER UTAMA
dengan
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.
KANTOR CABANG JAKARTA JATINEGARA

Nomor Pengadilan Militer Utama : 06/SEK.PMU/PL1.2/I/2024, tanggal 02 Januari 2024
Nomor : B. 354 /KC-V/LOG/01/2024, tanggal 02 Januari 2024

Perjanjian ini dibuat pada Selasa tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (02-01-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Nuratiah, S.H., M.H.**, jabatan Sekretaris Pengadilan Militer Utama, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 93/SEK/SK.KU1.1/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023, oleh karena itu mewakili Pengadilan Militer Utama, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"
- II. **Iwan Supriyanto**, Pimpinan cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk Jakarta Jatinegara, berkantor di Jalan Jatinegara Timur No. 44 B Jakarta Timur 13310, bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Pimpinan Cabang mewakili Direksi berdasarkan surat Kuasa Direksi Akta No. 07 tanggal 21-12-2022 (dua belas Desember dua ribu dua puluh dua) yang dibuat dihadapan EMI SUSILOWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir kali diubah dalam Akta Nomor 1 Tanggal 02-05-2023 (dua Mei dua ribu dua puluh tiga) yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0113662 tanggal 03-05-2023 (tiga Mei dua ribu dua puluh tiga), bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman No.44-46 Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** selaku pemilik hak atas sebidang tanah.
2. **PIHAK KEDUA** untuk memudahkan pelayanan perbankan kepada anggota Pengadilan Militer Utama, memerlukan ruangan untuk ATM di lokasi tersebut diatas.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Sewa-menyeWA dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
LINGKUP PERJANJIAN

Untuk lebih memberdayakan dan meningkatkan kegunaan serta nilai tambah dari tanah Pengadilan Militer, maka **PIHAK PERTAMA** menyewakan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyewa dari **PIHAK PERTAMA** sebidang tanah Pengadilan Militer Utama tersebut di atas.

PIHAK I :
PIHAK II :


Pasal 2 **OBYEK DAN PERUNTUKAN**

- (1) Obyek sewa menyewa tersebut pada pasal 1 di atas :
- | | |
|--------------------|--|
| Letak | : Pengadilan Militer Utama
Jl. Raya Penggilingan Cakung Jakarta Timur |
| Luas Tanah | : ± 2,1 m ² x 2,5 m ² |
| Status Kepemilikan | : Milik Pengadilan Militer Utama |
- (2) Peruntukan obyek sewa menyewa tersebut digunakan untuk dibangun ruangan ATM BRI.

Pasal 3 **JANGKA WAKTU DAN HARGA SEWA**

- (1) Jangka waktu sewa menyewa ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung efektif mulai tanggal Satu bulan Januari tahun Dua ribu Dua Puluh Empat (01-01-2024) sampai dengan tanggal Tiga puluh satu bulan Desember tahun Dua ribu Dua Puluh Lima (31-12-2025) yang dibayarkan per tahun paling lambat tanggal 31 Januari.
- (2) Jangka waktu sewa menyewa dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan untuk perpanjangan tersebut **PIHAK KEDUA** memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu berakhir.
- (3) Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.S-1/MK.6/KNL.0701/2024 tanggal 2 Januari 2024 perihal Persetujuan Sewa atas Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada Pengadilan Militer Utama berupa penempatan ATM BRI yang berlokasi di Komplek Pengadilan Militer Utama, Jl. Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur sebesar Rp 50.502.000,- (lima puluh dua ratus dua ribu rupiah) selama 2 (dua) tahun.
- (4) Jika ada perubahan ketentuan besarnya sewa menyewa termasuk di dalamnya pemasukan kepada Kas Negara yang berasal dari penerimaan Negara Bukan Pajak dari Mahkamah Agung RI dan Departemen Keuangan Republik Indonesia, maka PARA PIHAK akan melakukan kesepakatan kembali.

Pasal 4 **CARA PEMBAYARAN**

- (1) Pembayaran dilakukan :
- Pembayaran sewa tersebut dilakukan pertahun dengan nominal sebesar Rp. 25.251.000,- (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).
 - Semua pembayaran atas tanah yang disewakan dapat dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** melalui mekanisme setoran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dengan Mata Anggaran Penerimaan PNBP 425131 (Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan) melalui Bendahara Pengadilan Militer Utama.

PIHAK I :
PIHAK II :


Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA

- a. Menerima pembayaran sewa dari **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya diserahkan kepada Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui aplikasi *Digit* yang dikeluarkan oleh Pengadilan Militer Utama.
- b. Menerima kembali obyek sewa menyewa setelah jangka waktu sewa menyewa berakhir.
- c. Memberikan jaminan ketentraman dan keselamatan atas penggunaan tanah yang menjadi obyek sewa menyewa selama berlangsungnya sewa menyewa.
- d. Menyediakan tempat untuk pemasangan antena parabola V-Sat.
- e. Menyediakan tempat pemasangan Neon Sign dan Pylon yang mana melekat pada ATM Bank Rakyat Indonesia.
- f. Mendukung kelancaran pemeriksaan berkala dan perbaikan ATM BRI oleh teknisi dari **PIHAK KEDUA**.
- g. Mendukung kelancaran pelaksanaan pengisian kembali uang tunai kedalam ATM oleh **PIHAK KEDUA**.
- h. Memberikan izin kepada **PIHAK KEDUA** atau teknisi yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** untuk melakukan service/pemeliharaan dan perbaikan atas ATM BRI.
- i. Memberikan kesempatan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan perbaikan berkala (kalau diperlukan) secara teratur pada semua fasilitas yang ada, agar fasilitas tersebut dapat bekerja dengan baik.

(2) PIHAK KEDUA

- a. Menggunakan tanah yang dijadikan obyek sewa menyewa sesuai dengan kebutuhan dan keperluan **PIHAK KEDUA** atas beban dan tanggungan **PIHAK KEDUA**.
- b. Membangun ruangan ATM BRI yang dijadikan obyek sewa menyewa sesuai dengan kebutuhan dan keperluan **PIHAK KEDUA** atas beban dan tanggungan **PIHAK KEDUA**.
- c. Mengoperasikan ATM BRI mulai hari Senin sampai dengan Minggu termasuk hari libur selama 24 jam sehari.
- d. Mengasuransikan sendiri semua barang milik **PIHAK KEDUA** yang berada di dalam ruangan ATM BRI, termasuk dana di dalam ATM BRI dan barang-barang lainnya milik **PIHAK KEDUA** yang berada di lokasi **PIHAK PERTAMA** terhadap bahaya kebakaran, kehilangan/kerusakan oleh sebab apapun juga atas tanggungan biaya **PIHAK KEDUA**.
- e. Membayar uang sewa sesuai dengan pembayaran sebagaimana diatur dalam pasal 3 di atas.
- f. Memelihara ATM BRI sehingga dapat beroperasi dengan baik.
- g. Memberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK PERTAMA** jadwal pemeriksaan berkala ATM BRI oleh teknisi dari **PIHAK KEDUA**.
- h. Memberitahukan **PIHAK PERTAMA** jika ada rencana penghentian sementara operasional ATM BRI.
- i. Melakukan langkah-langkah atau tindakan-tindakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan dari pihak-pihak yang bermaksud tidak baik dan meningkatkan keamanan ATM BRI baik secara fisik maupun non fisik (dari segi perangkat lunak).
- j. Memelihara sebaik-baiknya dan wajib memperbaiki dengan segera kerusakan-kerusakan yang diakibatkan karena kesalahan/kerusakan mesin/peralatan **PIHAK KEDUA**.
- k. Membayar biaya pemakaian listrik setiap bulannya langsung kepada Perusahaan Listrik Negara sehubungan dengan beroperasinya ATM BRI dimaksud yang seluruhnya biaya pemasangan, meteran listrik tersebut dibayar dan ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.

PIHAK I :
PIHAK II :


- I. Mengadakan sendiri antene Parabola V-Sat atas nama PIHAK KEDUA untuk mengoperasikan ATM BRI dengan biaya pengadaan antena Parabola V-Sat atas tanggungan dan beban **PIHAK KEDUA**.
- m. Menanggung biaya pemasangan Neon Sign Pylon yang melekat pada ATM BRI.
- n. Menjaga kebersihan dan ketertiban di tempat ATM BRI dan lingkungan sekitarnya.

Pasal 6 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian sewa menyewa ini berakhir karena jangka waktu sewa menyewa setelah habis masa berlakunya atau
 - a. Karena ada kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri perjanjian sebelum berakhirnya masa perjanjian, atau
 - b. Karena salah satu pihak melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 di atas.
- (2) Apabila pada saat perjanjian ini berakhir terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah timbul dan belum dilaksanakan/dipenuhi oleh para pihak sampai saat perjanjian ini berakhir, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak tersebut wajib dipenuhi/diselesaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perjanjian ini berakhir.

Pasal 7 JAMINAN

- (1) PARA PIHAK masing-masing menyatakan dan menjamin terhadap satu dengan yang lain bahwa pihak-pihak yang menandatangani perjanjian ini adalah benar-benar pihak-pihak yang secara sah berwenang untuk bertindak mewakili dari pihak yang diwakilinya sesuai dengan dan atau seluruh ketentuan hukum termasuk telah dipenuhinya prosedur internal yang ada dan berlaku sebagaimana mestinya pada masing-masing.
- (2) Selama perjanjian ini berlangsung **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa :
 - a. Tanah yang dijadikan obyek sewa menyewa tidak dalam keadaan sengketa, tidak sedang disewakan atau dijaminkan atau belum pernah dialihkan hak kepemilikan dan atau penggunaannya kepada **PIHAK KETIGA**.
 - b. Sebelumnya tidak pernah ada kerjasama atau kesepakatan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KETIGA** lainnya dalam bentuk dan cara apapun juga menyangkut tanah yang dijadikan obyek sewa menyewa, kecuali perjanjian sewa menyewa yang hanya dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini.
- (3) PARA PIHAK masing-masing menjamin satu terhadap yang lain melaksanakan seluruh isi kesepakatan dalam perjanjian dengan sebaik-baiknya.

Pasal 8 SANKSI DAN DENDA

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat membayar uang sewa kepada **PIHAK PERTAMA** selama 30 (tiga puluh) hari setelah surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi dan denda karena keterlambatannya sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah kewajiban yang masih harus dibayarkan.

PIHAK I :
PIHAK II : 

Pembayaran denda tersebut tidak menghapuskan kewajiban **PIHAK KEDUA** untuk menyerahkan pembayaran sewa yang diperjanjikan.

- (2) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini ternyata **PIHAK KEDUA** terlambat menyerahkan kembali obyek sewa menyewa kepada **PIHAK PERTAMA** maka cukup dibuktikan dengan telah dilewatkannya waktu saja tanpa diperlukan teguran atau pemberitaan apapun atas keterlambatan tersebut **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi dan denda keterlambatan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya terhitung efektif mulai hari kelimabelas yang harus dibayar seketika dan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9 FORCE MAJEURE

- (1) Hal-hal yang termasuk Force Majeure dalam perjanjian ini adalah peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan manusia, seperti bencana alam, sabotase, huru-hara, peperangan, epidemi dan kebakaran yang berada diluar kekuasaan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal ini force majeure , maka PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis serta memberikan bukti-bukti kepada pihak lainnya mengenai terjadinya peristiwa force majeure tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya force majeure tersebut.
- (3) Apabila terjadi force majeure yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK dibebaskan dari segala kewajiban atau tuntutan dari masing – masing pihak satu dengan lainnya.

Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Tentang Perjanjian ini dan segala akibatnya PARA PIHAK memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Pasal 11 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi pengakhiran yang disebabkan oleh kesalahan, kelalaian dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 5 di atas, PARA PIHAK sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUHP Perdata, sehingga pengakhiran Perjanjian akan berlaku dan berdaya guna paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari pihak yang berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini .
- (2) Hal-hal yang tidak diatur atau sekiranya belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan dibicarakan dan diputuskan oleh dan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK secara bersama-sama. Perjanjian ini tidak berakhir karena dibubarkannya para pihak. Dalam hal tersebut para pengganti hak, masing-masing pihak wajib mentaati syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diuraikan dalam perjanjian ini.

PIHAK I :
PIHAK II :


- (3) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk memindahkan, mensub-kontrakkan Perjanjian ini atau setiap hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini kepada PIHAK KETIGA tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak lainnya.
- (4) Bila terjadi perselisihan paham antar kedua belah pihak, harus diputuskan/direalisasikan secara tertulis oleh kedua belah pihak berdasarkan musyawarah.
- (5) Tentang Perjanjian ini dan segala akibatnya, para pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur di Jakarta.
- (6) Terhadap Perjanjian ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (7) Semua pemberitahuan dan surat-menyerat yang berhubungan dengan Perjanjian ini dialamatkan kepada ;

PIHAK PERTAMA : PENGADILAN MILITER UTAMA
Jl. Raya Penggilingan Cakung Jakarta Timur

PIHAK KEDUA : PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
Kantor Cabang Jakarta Jatinegara
Jalan Jatinegara Timur Nomor 44B
Jakarta Timur 13310
Telepon (021) 8506400
Facsimile (021) 8500646

Demikian Perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak diatas meterai yang cukup pada hari dan tanggal sebagai mana tercantum diawal Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA

PENGADILAN MILITER UTAMA
Sekretaris

Nuratiah, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda NIP. 197109051998032005

PIHAK KEDUA

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
KANTOR CABANG JAKARTA JATINEGARA



Iwan Supriyanto
Pemimpin Cabang

PIHAK I :
PIHAK II :

ADDENDUM
SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA ATM
antara
PENGADILAN MILITER UTAMA
dengan
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.
KANTOR CABANG JAKARTA JATINEGARA

Nomor Pengadilan Militer Utama : 245/SEK.PMU/PL1.2/I/2024, tanggal 27 Februari 2024
Nomor : B. 625/KC-V/LOG/01/2024, tanggal 27 Februari 2024

ATAS
SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA ATM

Nomor Pengadilan Militer Utama : 06/SEK.PMU/PL1.2/I/2024, tanggal 02 Januari 2024
Nomor : B. 3621/KC-V/LOG/01/2024, tanggal 02 Januari 2024

Addendum perjanjian ini dibuat pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (27-02-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Nuratiah, S.H., M.H.**, jabatan Sekretaris Pengadilan Militer Utama, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 93/SEK/SK.KU1.1/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023, oleh karena itu mewakili Pengadilan Militer Utama, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"
- II. **Iwan Supriyanto**, Pemimpin cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk Jakarta Jatinegara, berkantor di Jalan Jatinegara Timur No. 44 B Jakarta Timur 13310, bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Pemimpin Cabang mewakili Direksi berdasarkan surat Kuasa Direksi Akta No. 07 tanggal 21-12-2022 (dua belas Desember dua ribu dua puluh dua) yang dibuat dihadapan EMI SUSILOWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir kali diubah dalam Akta Nomor 1 Tanggal 02-05-2023 (dua Mei dua ribu dua puluh tiga) yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0113662 tanggal 03-05-2023 (tiga Mei dua ribu dua puluh tiga), bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman No.44-46 Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**"

Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebelumnya telah saling mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum sewa menyewa yang dicantumkan dalam Perjanjian Sewa Nomor : 06/SEK.PMU/PL1.2/I/2024, tanggal 02 Januari 2024 dan B. 3621/KC-V/LOG/01/2024, tanggal 02 Januari 2024 dengan obyek sebagai berikut :

Obyek sewa	: Sebidang Tanah
Letak	: Pengadilan Militer Utama
	Jl. Raya Penggilingan Cakung Jakarta Timur
Luas Tanah	: ± 2,1 m ² x 2,5 m ²
Status Kepemilikan	: Milik Pengadilan Militer Utama

PIHAK I :

PIHAK II :

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk melakukan Addendum terhadap perjanjian yang syarat-syarat dan ketentuannya sebagai berikut :

2. Melakukan perubahan Pasal 3 tentang Jangka Waktu dan Harga Sewa yang semula sebagai berikut :

Pasal 3 **JANGKA WAKTU DAN HARGA SEWA**

- (1) Jangka waktu sewa menyewa ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung efektif mulai tanggal Satu bulan Januari tahun Dua ribu Dua Puluh Empat (01-01-2024) sampai dengan tanggal Tiga puluh satu bulan Desember tahun Dua ribu Dua Puluh Lima (31-12-2025) yang dibayarkan per tahun paling lambat tanggal 31 Januari.
- (2) Jangka waktu sewa menyewa dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan untuk perpanjangan tersebut **PIHAK KEDUA** memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu berakhir.
- (3) Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.S-1/MK.6/KNL.0701/2024 tanggal 2 Januari 2024 perihal Persetujuan Sewa atas Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada Pengadilan Militer Utama berupa penempatan ATM BRI yang berlokasi di Komplek Pengadilan Militer Utama, Jl. Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur sebesar Rp 50.502.000,- (lima puluh dua ratus dua ribu rupiah) selama 2 (dua) tahun.
- (4) Jika ada perubahan ketentuan besarnya sewa menyewa termasuk di dalamnya pemasukan kepada Kas Negara yang berasal dari penerimaan Negara Bukan Pajak dari Mahkamah Agung RI dan Departemen Keuangan Republik Indonesia, maka PARA PIHAK akan melakukan kesepakatan kembali.

Berubah Menjadi :

Pasal 3 **JANGKA WAKTU DAN HARGA SEWA**

- (1) Jangka waktu sewa menyewa ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung efektif mulai tanggal Satu bulan Januari tahun Dua ribu Dua Puluh Empat (01-01-2024) sampai dengan tanggal Tiga puluh satu bulan Desember tahun Dua ribu Dua Puluh Lima (31-12-2025) yang dibayarkan per tahun paling lambat tanggal 2 Januari.
- (2) Jangka waktu sewa menyewa dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan untuk perpanjangan tersebut **PIHAK KEDUA** memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu berakhir.
- (3) Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.S-1/MK.6/KNL.0701/2024 tanggal 2 Januari 2024 perihal Persetujuan Sewa atas Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada Pengadilan Militer

PIHAK I :
PIHAK II :


Utama berupa penempatan ATM BRI yang berlokasi di Komplek Pengadilan Militer Utama, Jl. Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur sebesar Rp 50.502.000,- (lima puluh juta lima ratus dua ribu rupiah) selama 2 (dua) tahun.

- (4) Jika ada perubahan ketentuan besarnya sewa menyewa termasuk di dalamnya pemasukan kepada Kas Negara yang berasal dari penerimaan Negara Bukan Pajak dari Mahkamah Agung RI dan Departemen Keuangan Republik Indonesia, maka **PARA PIHAK** akan melakukan kesepakatan kembali.
3. Melakukan perubahan Pasal 8 tentang Sanksi dan Denda yang semula sebagai berikut :

Pasal 8 SANKSI DAN DENDA

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat membayar uang sewa kepada **PIHAK PERTAMA** selama 30 (tiga puluh) hari setelah surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi dan denda karena keterlambatannya sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah kewajiban yang masih harus dibayarkan. Pembayaran denda tersebut tidak menghapuskan kewajiban **PIHAK KEDUA** untuk menyerahkan pembayaran sewa yang diperjanjikan.
- (2) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini ternyata **PIHAK KEDUA** terlambat menyerahkan kembali obyek sewa menyewa kepada **PIHAK PERTAMA** maka cukup dibuktikan dengan telah dilewatkannya waktu saja tanpa diperlukan teguran atau pemberitaan apapun atas keterlambatan tersebut **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi dan denda keterlambatan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya terhitung efektif mulai hari kelimabelas yang harus dibayar seketika dan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**.

Berubah Menjadi :

Pasal 8 SANKSI DAN DENDA

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** belum melakukan perbaikan dan/atau penggantian dalam rangka pengembalian ke dalam kondisi baik dan layak fungsi obyek sewa menyewa, dan/atau belum menyerahkan obyek sewa menyewa kepada **PIHAK PERTAMA** ketika pelaksanaan sewa berakhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi berupa surat teguran.
- (2) Dalam hal sampai dengan 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat teguran belum dilakukan tindak lanjut oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** mengenakan sanksi berupa surat peringatan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Dalam hal sampai dengan 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan belum dilakukan tindak lanjut oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** mengenakan sanksi administratif berupa denda dengan ketentuan sebesar 2% (dua persen) per hari dari nilai perbaikan dan/atau penggantian yang masih terutang atau sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari besaran sewa sesuai ketentuan yang berlaku yang dihitung

PIHAK I :

PIHAK II :

dengan menggunakan periode sewa harian sesuai keterlambatan penyerahan obyek sewa menyewa.

- (4) Dalam hal **PIHAK KEDUA** terlambat melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan yang telah ditentukan dalam perjanjian maka wajib membayar denda sebesar 2% (dua persen) per bulan (bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh) dari jumlah kewajiban yang masih harus dibayarkan menggunakan akun 425131 (Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan).
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada poin (4) dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (6) Pembayaran denda dilakukan melalui bendahara penerimaan yang melakukan penyetoran ke rekening Kas Umum Negara.
4. Addendum ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal sebagaimana disebutkan dalam bagian awal Addendum ini.
5. Hal-hal lain yang telah diatur dalam perjanjian yang tidak dilakukan perubahan dalam Addendum ini tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.

Demikian Addendum ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing pihak memperoleh satu rangkap yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama.

PIHAK PERTAMA

PENGADILAN MILITER UTAMA
Sekretaris



Nuratiah, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda NIP. 197109051998032005

PIHAK KEDUA

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
KANTOR CABANG JAKARTA JATINEGARA C



Iwan Supriyanto
Pemimpin Cabang

PIHAK I :
PIHAK II : ✓



Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820240130051938
Tanggal Billing : 30-01-2024 13:04:32
Tanggal Kedaluwarsa : 06-02-2024 13:04:32
Tanggal Bayar : 31-01-2024 11:57:52
Bank/Pos/Fintech Bayar : BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar : Teller
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara Penerimaan Pengadilan Militer Utama
Kementerian/Lembaga : 005 - MAHKAMAH AGUNG
Unit Eselon I : 01 - Badan Urusan Administrasi
Satuan Kerja : 663161 - PENGADILAN MILITER UTAMA
Total Disetor : 25.251.000 (IDR)
Terbilang : Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu (IDR)
Status : Sudah Dibayar
NTB : 240131363236
NTPN : C42D27QLUONSI3R2

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
Kode Akun : 425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
Jumlah Setoran : 25.251.000 (IDR)
Keterangan : Pendapatan Sewa ATM BRI Tahun 2024



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820240322984030
Tanggal Billing : 22-03-2024 08:31:43
Tanggal Kedaluwarsa : 29-03-2024 08:31:43
Tanggal Bayar : 22-03-2024 11:23:08
Bank/Pos/Fintech Bayar : BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar : *Overbooking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara Penerimaan Pengadilan Militer Utama
Kementerian/Lembaga : **005** - MAHKAMAH AGUNG
Unit Eselon I : **01** - Badan Urusan Administrasi
Satuan Kerja : **663161** - PENGADILAN MILITER UTAMA
Total Disetor : 505.020 (IDR)
Terbilang : *Lima Ratus Lima Ribu Dua Puluh (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **240322192277**
NTPN : **566126U8EUB84U2U**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
Kode Akun : 425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
Jumlah Setoran : 505.020 (IDR)
Keterangan : Pembayaran Denda Keterlambatan PNBP Sewa ATM BRI Tahun 2024 Tgl. 01-01-2024 s/d 31-01-2024

BANK RAKYAT INDONESIA	BUKTI PENERIMAAN NEGARA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	KEMENTERIAN KEUANGAN
--------------------------	--	-------------------------

Data Pembayaran:

Tanggal dan Jam Bayar : 22/03/2024 11:23:08 NTB : 240322192277
Tanggal Buku : 22/03/2024 NTPN : 566126U8EUB84U2U
Kode Cabang Bank : 0122 STAN : 306117

Data Setoran:

Kode Billing : 820240322984030
Nama Wajib Bayar : Bendahara Penerimaan Pengadilan Militer Utama
Kementerian/Lembaga : 005
Unit Eselon I : 01
Satuan Kerja : 663161
Jumlah Setoran : Rp. 505,020.00 Mata Uang : IDR
Terbilang : LIMA RATUS LIMA RIBU DUA PULUH RUPIAH

*This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan*

Validasi Bank

Bendahara Penerimaan Pengadilan Militer Utama 0000 505020.00 22032024 22032024
566126U8EUB84U2U 240322192277 306117 139

7016 0122055 8720 6001000 22032024 112308
012201000962991 Lainnya IDR 505,020.00 Cr
03290100343407 REK PERSEPSI IDR 505,020.00 Cr
NTPN : 566126U8EUB84U2U

BANK RAKYAT INDONESIA	BUKTI PENERIMAAN NEGARA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	KEMENTERIAN KEUANGAN
--------------------------	--	-------------------------

Data Pembayaran:

Tanggal dan Jam Bayar : 22/03/2024 11:23:08 NTB : 240322192277
 Tanggal Buku : 22/03/2024 NTPN : 566126U8EUB84U2U
 Kode Cabang Bank : 0122 STAN : 306117

Data Setoran:

Kode Billing : 820240322984030
 Nama Wajib Bayar : Bendahara Penerimaan Pengadilan Militer Utama
 Kementerian/Lembaga : 005
 Unit Eselon I : 01
 Satuan Kerja : 663161
 Jumlah Setoran : Rp. 505,020.00 Mata Uang : IDR
 Terbilang : LIMA RATUS LIMA RIBU DUA PULUH RUPIAH

*This is a computer generated message and requires no signature
 Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan*

Validasi Bank

Bendahara Penerimaan Pengadilan Militer Utama 0000 505020.00 22032024 22032024
 566126U8EUB84U2U 240322192277 306117 139

7016 0122055 8720 6001000 22032024 112308
 012201000962991 Lainnya IDR 505,020.00 DR
 03290100343407 REK PERSEPSI IDR 505,020.00 CR
 NTPN : 566126U8EUB84U2U



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820240125466562
Tanggal Billing : 25-01-2024 13:43:31
Tanggal Kedaluwarsa : 01-02-2024 13:43:31
Tanggal Bayar : 26-01-2024 08:53:09
Bank/Pos/Fintech Bayar : BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar : *Teller*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara Penerimaan Pengadilan Militer Utama
Kementerian/Lembaga : **005** - MAHKAMAH AGUNG
Unit Eselon I : **01** - Badan Urusan Administrasi
Satuan Kerja : **663161** - PENGADILAN MILITER UTAMA
Total Disetor : 417.700 (IDR)
Terbilang : *Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **240126311309**
NTPN : **EF86A2G4VP9DO5U2**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
Kode Akun : 425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
Jumlah Setoran : 417.700 (IDR)
Keterangan : Pembayaran Denda Keterlambatan PNBP Sewa ATM BRI Tahun 2023 Tgl.
01-01-2023 s/d 23-01-2023



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-169/MK.6/KNL.0701/2024 23 Juli 2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yth. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
u.p. Sekretaris Pengadilan Militer Utama
Jalan Raya Penggilingan, Cakung
Jakarta Timur 13940

Sehubungan dengan surat Sekretaris Pengadilan Militer Utama Nomor 600/SEK.PMU/PL1.2.1/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 perihal Permohonan Persetujuan Lelang Barang Milik Negara (BMN), dengan ini diberitahukan bahwa permohonan penjualan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan, berupa 1 (satu) unit kendaraan dinas bermotor roda empat, yang tercatat pada satuan kerja Pengadilan Militer Utama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan nilai perolehan sebesar Rp388.627.800,00 (tiga ratus delapan puluh delapan ratus enam ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui dengan ketentuan penjualan dilaksanakan secara lelang.

Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan penjualan dan penghapusan Barang Milik Negara agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindah tanginan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 165/PMK.06/2021, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penjualan Barang Milik Negara tersebut tidak mengganggu tugas operasional kantor Saudara dan persetujuan penjualan ini bukan merupakan jaminan disediakannya dana anggaran untuk pengadaan Barang Milik Negara yang baru sebagai pengganti Barang Milik Negara yang dijual.
2. Persetujuan ini agar segera ditindaklanjuti dengan penjualan secara lelang (*e-Auction*) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan nilai limit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berdasarkan hasil penilaian/taksiran Tim Panitia Penghapusan dan Penjualan BMN pada Pengadilan Militer Utama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan tata Usaha Negara, Mahkamah Agung Republik Indonesia serta hasil penjualan seluruhnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.
3. Pelaksanaan hasil penjualan secara lelang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang paling lama 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan lelang.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

2

4. Penghapusan Barang Milik Negara dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dilakukan berdasarkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara yang diterbitkan Pengguna Barang paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima.
5. Menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara kepada Pengelola Barang c.q. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan penghapusan Barang Milik Negara ditandatangani dengan dilampiri Surat Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara, Fotokopi Salinan Risalah Lelang, Berita Acara Serah Terima, dan Fotokopi Bukti Setor ke Rekening Kas Umum Negara.
6. Kebenaran materiil atas jenis, jumlah, tahun, dan nilai Barang Milik Negara yang dijual tersebut menjadi tanggung jawab Pengguna Barang.
7. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara Dan Lelang
Jakarta I



Ditandatangani secara elektronik
Rofii Edy Purnomo

Tembusan:

1. Menteri Keuangan (sebagai laporan);
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
5. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara DJKN;
6. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara DJKN;
7. Direktur Lelang DJKN;
8. Ketua Pengadilan Militer Utama; dan
9. Kepala Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta.





Lampiran
Surat Menteri Keuangan
Nomor : S-169/MK.6/KNL.0701/2024
Tanggal : 23 Juli 2024

**DAFTAR BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DISETUJUI UNTUK DIJUAL
PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

No	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Merk/Tipe	Nomor Polisi	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Limit (Rp)	Kondisi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	3.02.01.01.001	7	Sedan	Toyota / Camry 2.4 MT	B 1378 VQ	2006	388.627.800,00	10.000.000,00	Rusak Berat
Total							388.627.800,00	10.000.000,00	

a.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara Dan Lelang Jakarta I



Ditandatangani secara elektronik
Rofii Edy Purnomo





SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 153/SEK/PL.06/5/2023
Sifat : Segera
Hal : Izin Penjualan BMN

Jakarta, 15 Mei 2023

Yth.
Kepala Pengadilan Militer Utama
di -
Jakarta

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Pengadilan Militer Utama Nomor Miltama/B/71/I/2023 tanggal 19 Januari 2023 perihal Permohonan Izin Penjualan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) pada Pengadilan Militer Utama, berdasarkan Berita Acara Penelitian dan Penilaian Barang Milik Negara Nomor Miltama/B/52/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 dengan spesifikasi sebagai berikut:

No.	Nama Barang	NUP	Kode Barang	Kondisi	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
1.	Sedan Toyota Camry No.Pol. B 1378 VQ No. BPKB: 8239095G No. Rangka: MR053BK305502230 No. Mesin: 24Z3213089	7	3020101001	Rusak Berat	2006	388.627.800	STNK Hilang (Surat Tanda Lapor Kehilangan Barang/Surat Nomor 172/STLK/V/2023/Sek.Plg. tanggal 7 Mei 2023)
Total						388.627.800	

Dikarenakan kendaraan dinas tersebut sudah rusak berat dan tidak dapat dipergunakan lagi untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pada Pengadilan Militer Utama, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia pada prinsipnya dapat menyetujui untuk dilakukan proses penjualan Barang Milik Negara berupa kendaraan dinas tersebut secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat.

Demikian untuk dapat dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,



Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Sekretaris Pengadilan Militer Utama.



SALINAN

RISALAH LELANG

NOMOR : 548/07.01/2024-01

TANGGAL : 25 September 2024

PEJABAT LELANG : Rachman Sucipto,S.E., M.M.

PENJUAL : Pengadilan Militer Utama

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAKARTA I**

Lembar Pertama
Pejabat Lelang

Ttd.

Rachman Sucipto, S.E., M.M
NIP 19850724 201012 1 006

SALINAN
RISALAH LELANG
Nomor 548/07.01/2024-01

----Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh lima bulan September tahun dua ribu dua puluh empat (25-09-2024), dimulai pukul sebelas (11:00) Waktu Server aplikasi lelang melalui internet sesuai Waktu Indonesia Barat oleh saya: -----
Rachman Sucipto, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, NIP 19850724 201012 1
----- 006 -----

Pejabat Lelang Kelas I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 02/KM.6/UP.11/2013 tanggal 08 April 2013, berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-1457/KNL.0701/2024 tanggal 20 September 2024 dilaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor. 10 DKI Jakarta. -----

----Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan Nuratiah Sekretaris Pengadilan Militer Utama, berkedudukan di Jalan Raya Penggilingan, RT.10/RW.4, Penggilingan, Kecamatan. Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13940, sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor 600/SEK.PMU/PL1.2.1/V/2024 tanggal 31 Mei 2024, yang telah ditetapkan jadwal lelangnya sesuai Surat Penetapan Lelang Nomor S-2350/KNL.0701/2024 tanggal 13 September 2024 guna melaksanakan Surat Keputusan Nomor S-169/MK.6/KNL.0701/2024 Tanggal 23 Juli 2024. -----

----Dalam pelaksanaan lelang ini Saudara: -----
Annas Haq Anwar, Sarjana.Ekonomi, Magister.Hukum. bertindak dalam jabatannya dan atas nama Pengadilan Militer Utama berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penjualan Lelang/Surat Penunjukkan Pejabat Penjual Nomor 967/SEK.PMU/PL1.2.2/VIII/2024 Tanggal 20 Agustus 2024; SK Panitia Lelang Nomor 94/KPMU/SK.PL.07/IV/2024 tanggal 30 April 2024 melaksanakan penjualan lelang dengan perantaraan KPKNL Jakarta I. -----

----Barang bergerak yang dilelang berupa: -----
1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merk/Tipe Toyota Camry 2.4 MT No Rangka MR053BK3055502230 No Mesin 24Z3213089 Tahun Pembuatan 2005 BPKB ADA, STNK TIDAK ADA No. Polisi B 1378 VQ Kondisi Rusak Berat Warna Hitam Metalik -- Nilai Limit : Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) -----

Barang bergerak tersebut saat ini berada di Pengadilan Militer Utama, Jalan Raya Penggilingan, RT.10/RW.4, Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. -----

dilelang apa adanya. -----
----Pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual melalui Selebaran tanggal 18 September 2024. -----

----Hasil bersih lelang ini disetorkan kepada Kas Negara. -----

----Penjualan lelang ini dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) jis. Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait Lelang. -----

----Barang tersebut.../Lembar Kedua

Pejabat Lelang

Ttd.

Rachman Sucipto, S.E., M.M
NIP 19850724 201012 1 006

-----Barang tersebut akan ditawarkan dan disahkan penjualannya oleh saya Pejabat Lelang, berdasarkan Nilai Limit dari Penjual. -----

-----Peserta lelang dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini setelah menunjukkan identitas diri dan menyetorkan uang jaminan penawaran lelang/menyerahkan garansi bank jaminan penawaran lelang, sesuai Pengumuman Lelang, dengan ketentuan: -----

1. Dalam hal Jaminan Penawaran Lelang berupa uang, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

---a. uang jaminan dari peserta lelang yang disahkan sebagai Pembeli akan diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran lelang; -----

---b. uang jaminan dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun, di luar mekanisme perbankan; -----

---c. uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----

2. Dalam hal Jaminan penawaran lelang berupa garansi bank, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

---a. garansi bank dikembalikan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli; -----

---b. garansi bank dikembalikan kepada Pembeli setelah yang bersangkutan melunasi kewajiban pembayaran lelang; -----

---c. hasil klaim garansi bank disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----

-----Penawaran lelang dilakukan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet cara terbuka (open bidding) pada aplikasi lelang melalui internet. -----

-----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan kehadiran peserta secara lisan, maka: -----

1. Penawaran harga dilakukan secara naik-naik/turun untuk mencapai harga tertinggi. -----

2. Besaran kelipatan ditentukan oleh Pejabat Lelang. -----

-----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan dan/atau tanpa kehadiran peserta secara tertulis dengan menggunakan formulir surat penawaran, maka: -----

1. Surat Penawaran harus ditulis dalam bahasa Indonesia dengan angka Arab dan huruf latin dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh penawar. -----

2. Surat penawaran diserahkan kepada Pejabat Lelang dalam amplop tertutup, dimasukan ke dalam kotak yang tersedia, atau dikirim melalui pos tercatat kepada alamat tromol pos yang telah ditentukan. -----

3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam surat penawaran mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----

-----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan tanpa kehadiran melalui internet, maka: --

1. penawaran lelang dilakukan secara tertutup atau terbuka dengan menggunakan aplikasi lelang melalui internet. -----

2. Peserta lelang yang mengajukan penawaran, telah menyetujui Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Melalui internet yang tercantum dalam aplikasi lelang melalui internet. -----

Pejabat Lelang

Ttd.

Rachman Sucipto, S.E., M.M
NIP 19850724 201012 1 006

3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam penawaran lelang mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----

-----Dalam hal lelang secara inklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang sudah termasuk Bea Lelang. Dalam hal lelang secara eksklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang belum termasuk Bea Lelang. -----

-----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi secara lisan semakin meningkat, menurun, atau tertulis dengan nilai yang sama dan mencapai atau melampaui Nilai Limit, Pejabat Lelang berhak menentukan Pemenang Lelang dengan cara: -----

1. melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap peserta lelang yang mengajukan penawaran sama, yang dilakukan secara lisan (naik-naik) atau tertulis berdasarkan persetujuan peserta lelang bersangkutan; atau. -----

2. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak dapat dilaksanakan, melakukan penetapan salah satu di antara peserta lelang yang mengajukan penawaran sama dengan melakukan pengundian. -----

-----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dengan nilai yang sama melalui internet, melalui email, dan/atau melaui tromol pos, Pejabat Lelang mengesahkan Peserta Lelang yang penawarannya diterima lebih dulu sebagai Pembeli -----

-----Dalam hal dilakukan penawaran secara bersamaan, dan terdapat penawaran tertinggi dengan nilai yang sama antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran melalui internet cara tertutup (closed bidding), melalui email, dan/atau melalui tromol pos dengan Peserta Lelang yang mengajukan penawaran secara tertulis dengan kehadiran, Pejabat Lelang berhak mengesahkan Pembeli dengan cara melakukan pengundian di antara Peserta Lelang yang mengajukan penawar tertinggi yang sama tersebut. -----

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara tertutup (closed bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----

2. Apabila gangguan teknis terjadi setelah lelang dimulai dan aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka penawaran tertinggi yang masuk ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. -----

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara terbuka (open bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----

2. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai namun aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dimulai oleh Pejabat Lelang dengan jangka waktu penawaran paling kurang 2 (dua) jam. -----

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan secara bersamaan antara lelang dengan kehadiran peserta dan lelang tanpa kehadiran peserta yang menyebabkan lelang tanpa kehadiran peserta tidak dapat

Pejabat Lelang

Ttd.

Rachman Sucipto, S.E., M.M
NIP 19850724 201012 1 006

dilakukan, lelang dengan kehadiran peserta tetap sah dan mengikat. -----
----Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau melampaui Nilai Limit yang ditetapkan oleh Penjual, disahkan sebagai Pembeli oleh saya Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan lelang hari ini juga. -----
----Bea Lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan. -----
----Dalam hal pelaksanaan lelang dengan kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----
----Dalam hal pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "tidak perlu hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----
----Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli dilakukan secara tunai paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. -----
----Pembayaran dengan cek/giro hanya dapat diterima dan dianggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli, jika cek/giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggota kliring, dananya mencukupi dan dapat diuangkan. -----
----Peserta lelang yang telah disahkan sebagai Pembeli bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada lelang ini walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan atau badan hukum. -----
----Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini, peserta lelang wajib mematuhi dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan lelang sebagaimana tertuang dalam risalah lelang ini, syarat dan ketentuan lelang yang ditempel pada papan pengumuman, syarat dan ketentuan pada pengumuman lelang, syarat dan ketentuan lelang yang ditayangkan pada aplikasi lelang melalui internet, dan syarat dan ketentuan yang tercantum pada formulir penawaran. -----
----Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (Pembeli Wanprestasi), maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai Pembeli dibatalkan secara tertulis oleh Pejabat Lelang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual. -----
----Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai Barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar ketentuan ini maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh penegak hukum. -----
----Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan Pembeli dan harus dengan segera mengurus Barang tersebut. -----
----Biaya balik nama barang, tunggakan pajak berikut denda-dendanya serta biaya lainnya sesuai ketentuan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pembeli. -----
----Pembeli akan diberikan kutipan risalah lelang untuk kepentingan balik nama setelah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang. Apabila yang dilelang berupa tanah dan/atau bangunan harus disertai dengan menunjukkan asli Surat Setoran BPHTB. -----
----Jika Pembeli tidak mendapatkan izin dari instansi pemberi izin untuk membeli barang yang dilelang sehingga jual beli ini menjadi batal, maka ia dengan ini oleh Penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali dengan hak untuk

Pejabat Lelang

Ttd.

Rachman Sucipto, S.E., M.M
NIP 19850724 201012 1 006

memindahkan kuasa itu untuk mengalihkan barang itu kepada pihak lain atas nama Penjual dengan dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagai kuasa dan jika ada menerima uang ganti kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari Pembeli. Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada Penjual tersebut diatas tidak dapat ditarik kembali oleh Pembeli. -----

-----Pejabat Lelang Kelas I/KPKNL tidak menanggung kebenaran keterangan-keterangan yang diberikan secara lisan pada waktu penjualan tentang keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum atas barang yang dilelang tersebut, seperti luasnya, batas-batasnya, perjanjian sewa-menyejahtera sepenuhnya menjadi risiko Pembeli. -----

-----Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawar olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga. -----

-----Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pembelian dalam lelang ini, para Pembeli dianggap telah memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubah pada KPKNL Jakarta I. -----

-----Khusus untuk pembelian dalam lelang ini sepanjang tidak ditentukan dalam Risalah Lelang ini, maka Penawar/Pembeli tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia. -----

-----Segala perselisihan yang timbul pada saat pelaksanaan lelang ini diselesaikan dan diputuskan pada hari ini juga oleh saya Pejabat Lelang. -----

-----Semua dokumen yang disebutkan dalam Risalah Lelang ini dilampirkan dan dijilid/dijahit dalam minuta risalah lelang ini. -----

-----Sesudah apa yang diuraikan di atas ini ditayangkan, maka penjualan lelang ini dimulai. -----

-----Banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah dalam pelaksanaan lelang ini berjumlah empat penawaran, dan tercapai penawaran tertinggi. Oleh karena penawaran tertinggi untuk barang tersebut telah mencapai/melampaui Nilai Limit dan disetujui Penjual, maka penawar tertinggi disahkan sebagai Pembeli pada pelaksanaan lelang ini. -----

-----Uraian barang, harga penawaran, dan nama serta alamat penawar tertinggi yang ditunjuk sebagai pembeli diuraikan berikut ini: -----

Barang yang laku/terjual: -----

1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merk/Tipe Toyota Camry 2.4 MT No Rangka MR053BK3055502230 No Mesin 24Z3213089 Tahun Pembuatan 2005 BPKB ADA, STNK TIDAK ADA No. Polisi B 1378 VQ Kondisi Rusak Berat Warna Hitam Metalik --
Harga Lelang ----- : Rp16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah)
Pembeli ----- : Iman Rehan, NIK 1571022008010021, Kepolisian RI
----- (POLRI), beralamat di Jalan Yusuf Nasri Lorong Pelita
----- RT/RW.021/000 Kelurahan/Desa Wijaya Pura Kecamatan
----- Jambi Selatan Kota Jambi Provinsi Jambi -----

Lembar terakhir dari Risalah Lelang Nomor : 548/07.01/2024-01 tanggal 25 September 2024

Banyaknya barang yang dilelang: 1 (satu) -----
Banyaknya barang yang laku/terjual: 1 (satu) -----
Jumlah harga barang yang laku/telah terjual: Rp16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) -----
Jumlah harga barang yang tidak laku: Rp0,00 (nol rupiah) -----
Jumlah harga barang yang ditahan: -----
Banyaknya lampiran sebelum Risalah Lelang ditutup: 19 (sembilan belas) -----
Dibuat dengan tidak ada coretan, tidak ada tambahan, tidak ada perubahan. -----

Penjual

Pejabat Lelang

Ttd.

Ttd.

Annas Haq Anwar, S.E.,
M.H.

Rachman Sucipto, S.E., M.M
NIP 19850724 201012 1 006

Diberikan: SALINAN sesuai dengan aslinya

Tanggal: 01 OCT 2024
Kepala KPKNL Jakarta I





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN DKI JAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I

JALAN PRAJURIT KKO USMAN DAN HARUN NOMOR 10, SENEN, JAKARTA 10410
TELEPON : (021) 34835237; FAKSIMILE : (021) 34835131 ; SITUS : www.djkn.kemenkeu.go.id

RINCIAN PENGELOUARAN UANG PEMBAYARAN LELANG

KEPADА YANG BERHAK

Nomor Risalah Lelang : 548/07.01/2024-01

Tanggal Lelang : 25 September 2024

Pejabat Lelang : Rachman Sucipto

1 Pokok Lelang	Rp.	16.400.000,00
2 Hasil Bersih Lelang Untuk Pemohon Lelang	Rp.	16.400.000,00
3 Bea Lelang		
a. Bea Lelang Pembeli	Rp.	328.000,00
b. Bea Lelang Penjual	Rp.	-
c. Bea Lelang Batal	Rp.	-
4 Pph Final	Rp.	-
5 Uang Jaminan Penawaran Lelang Pembeli Wanprestasi	Rp.	-
 Jumlah	 Rp.	 16.728.000,00

(enam belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Mengetahui,
Kepala Seksi Hukum dan Informasi



Agus Yulianto
NIP 197601211996031001

Jakarta, 30 September 2024
Bendahara Penerimaan

Putu Eka Piriawan
NIP 199506122018011005



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN DKI JAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I
JALAN PRAJURIT KKO USMAN DAN HARUN NOMOR 10, SENEN, JAKARTA 10410
TELEPON : (021) 34835237 ; FAKSIMILE : (021) 34835131 ; SITUS : www.djkn.kemenkeu.go.id

KUITANSI

NOMOR : 366 /KW/2024

Risalah Lelang Nomor : 548/07.01/2024-01 tanggal 25 September 2024

Sudah Terima dari : Iman Rehan
Alamat Jl. Yusuf Nasri LR. Pelita, RT.021, Kel/Desa Wijaya Pura, Kec. Jambi Selatan,
Kota Jambi, Prov. Jambi

Banyaknya Uang : Rp16.728.000,00
(enam belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Keterangan : Pelunasan Kewajiban Pembayaran Lelang atas permintaan Pengadilan Militer Utama,
MA RI, Pejabat Lelang Rachman Sucipto, berupa 1 (satu) Unit Kendaraan roda 4
merk/Tipe Toyota Camry 2.4 MT, No. Polisi B 1378 VQ

RINCIAN :

- Harga Pokok Lelang	Rp.	16.400.000,00
- Bea Lelang Pembeli	Rp.	328.000,00
Jumlah	Rp.	16.728.000,00

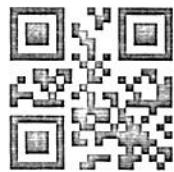
Mengetahui,
Kepala Seksi Hukum dan Informasi

Agus Yulianto
NIP 197601211996031001



Jakarta, 30 September 2024
Bendahara Penerimaan

Putu Eka Pirlawan
NIP 199506122018011005



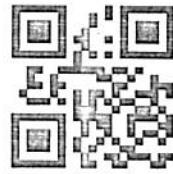
BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820240930174408
Tanggal Billing : 30-09-2024 09:13:10
Tanggal Kedaluwarsa : 07-10-2024 09:13:10
Tanggal Bayar : **30-09-2024 11:18:04**
Bank/Pos/Fintech Bayar : **BANK NEGARA INDONESIA**
Channel Bayar : **Internet Banking**
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara Penerimaan KPKNL Jakarta I
Kementerian/Lembaga : **005 - MAHKAMAH AGUNG**
Unit Eselon I : **01 - Badan Urusan Administrasi**
Satuan Kerja : **663161 - PENGADILAN MILITER UTAMA**
Total Disetor : 16.400.000 (IDR)
Terbilang : *Enam Belas Juta Empat Ratus Ribu (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **582877172178**
NTPN : **OB3371JNFVF0OTE8**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Kode Akun : 425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Jumlah Setoran : 16.400.000 (IDR)
Keterangan : HBL RL-548/07.01/2024-01



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820240930172070
Tanggal Billing : 30-09-2024 09:07:58
Tanggal Kedaluwarsa : 07-10-2024 09:07:58
Tanggal Bayar : **30-09-2024 11:18:04**
Bank/Pos/Fintech Bayar : **BANK NEGARA INDONESIA**
Channel Bayar : **Internet Banking**
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara Penerimaan KPKNL Jakarta I
Kementerian/Lembaga : **015 - KEMENTERIAN KEUANGAN**
Unit Eselon I : **09 - Ditjen Kekayaan Negara**
Satuan Kerja : **537721 - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I**
Total Disetor : 328.000 (IDR)
Terbilang : *Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **249911180937**
NTPN : **F2F567QLUPFNJR56**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : IV. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - B.Bea Lelang Pembeli - 3.Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah - b.Barang Bergerak
Kode Akun : 425782 - Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
Jumlah Setoran : 328.000 (IDR)
Keterangan : RL-548/07.01/2024-01